

Laporan Penelitian :

**PROYEKSI MAKRO EKONOMI
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019-2026**



**Dr. I Ketut Nama, M.Si
Astuti Rahayu, SE., M.Si**

FEB UPN Veteran Yogyakarta

2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan SWK 104 Lingkar Utara, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 55283

Telepon : (0274) 486255, 487276. Faximile : (0274) 486255

Laman : <http://ekonomi.upnyk.ac.id> - Email : feb@upnyk.ac.id

SURAT TUGAS

No: 450/UN 62.14/AKD.9/VIII/2019

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta memberikan tugas kepada :

Nama : **Dr. I Ketut Nama, M.Si. (Sebagai Ketua)**
NIP/NIK : 196204151988031001
Jabatan : Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan

Nama : **Astuti Rahayu, SE. M.Si. (Sebagai Anggota)**
NIP/NIK : 272099701731
Jabatan : Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan

Untuk :

KESATU : Disamping tugas pokok yang dipangkunya, bertindak sebagai Peneliti dengan judul : **PROYEKSI MAKRO EKONOMI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019-2026**

KEDUA : Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan rasa penuh tanggung jawab;

KETIGA : Melaporkan kepada Dekan setelah melaksanakan tugas ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat tugas ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 6 Agust 2019



DR. WINARNO, MM
NIP-19620621 199103 1001

Tembusan Yth :
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : **PROYEKSI MAKRO EKONOMI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2019-2026**
- b. Bidang Ilmu : **Ekonomi**
2. Ketua Tim Peneliti : **Dr. I Ketut Nama, M.Si**
3. Anggota Peneliti : **Astuti RAhayu, SE., M.Si**
4. Lokasi Penelitian : **Kabupaten Sleman, DIY**

Yogyakarta, 10 Desember 2019

Mengetahui
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan



(Dr. Winarno, MM)

Ketua Tim Peneliti

(Dr. I Ketut Nama, M.Si.)

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup Kegiatan	5
1.4. Sasaran Kegiatan	5
1.5. Dasar Hukum	5
1.6. Ketangka Penyusunan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1 PDRB	9
2.1.2 Tenaga Kerja	11
2.1.3 ICOR	12
2.1.4 Inflasi	12
2.1.5 Kemiskinan	14
2.1.6 Ketimpangan Wilayah	15
2.1.7 Analisis Komoditas Unggulan	18
2.1.8 Analisis SS	19
2.1.9 Analisis Input Output	21
2.2. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1. Konsep dan Definisi	23
3.2. Data dan Sumber Data	23
3.3. Metode Analisis Data	24
3.4. Devinisi Operasional Variabel	25

BAB IV PEMBAHASAN	27
4.1. Proyeksi PDRB	27
4.2. Proyeksi Ketenagakerjaan	31
4.3. Proyeksi Nilai ICOR	34
4.4. Proyeksi Nilai IHK dan Inflasi	37
4.5. Proyeksi PDRB dan Indeks Williamson	38
4.7. Proyeksi Analisis Sektoral	46
4.8. Proyeksi Analisis Input Output	51
4.9. Analisis SWOT	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB VI KESIMPULAN	69
6.1. Kesimpulan	69
6.2. Rekomendasi Kebijakan	70
Daftar Pustaka	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Oleh karena itu, Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Nilai – nilai pokok tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1993 :3) bahwa *development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy* (Arsyad, 2010).

Chenery dan Syrquin (1975) dalam Arsyad (2010) menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antar berbagai proses perubahan suatu negara. Proses perubahan multidimensi tersebut ditandai dengan proses transformasi struktural dimana juga ditandai oleh perubahan struktur ekonomi yang dicerinkan oleh kontribusi sektoral (*shift-share*) di dalam pendapatan nasional. Proses transformasi struktural ini ditandai dengan mulai bergesernya paradigma pembangunan yang semula berfokus pada sektor pertanian bergeser menjadi sektor industri dan jasa. Proses transformasi struktural ini sering dikenal dengan istilah pola normal pembangunan.

Proses transformasi struktural di Indonesia berlangsung sangat cepat dimana komposisi kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) semakin mengecil nilainya. Perubahan transformasi struktural ini juga ditandai dengan perubahan komposisi tenaga kerja pada masing-masing sektor. Satu hal lain yang senantiasa mengiringi proses struktural ini adalah

urbanisasi. Konsekuensi yang muncul adalah distribusi kesempatan kerja yang tidak merata akan menambah kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan selama proses transformasi ini masih berjalan.

Proses transformasi struktural juga turut memperburuk masalah kemiskinan dan ketimpangan. Dari studi yang dilakukan Kuznets (1955) dan Myrdal (1957) dalam Sjafrizal (2013) diperoleh temuan bahwa pada awalnya proses transformasi struktural berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan, karena kontribusi sektoral terkonsentrasi pada sektor modern. Oleh karena itu, pendapatan yang diperoleh dari sektor lama (misal pertanian) tidak hanya lebih rendah tetapi juga lebih timpang apabila dibandingkan dengan pendapatan pada sektor lainnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa selain membawa dampak positif berupa modernisasi struktur ekonomi dan kemasyarakatan, kenaikan PDB, serta perbaikan kapasitas produksi yang ada, proses transformasi struktural juga membawa dampak negatif berupa melebarnya kesenjangan antar sektor dan timbulnya dualisme desa-kota sebagai konsekuensi terkonsentrasinya industri daerah perkotaan. Oleh karena itu, perlu kiranya ada peninjauan ulang tentang upaya transformasi struktural yang dinamis, yaitu proses transformasi yang tidak menyebabkan adanya ketimpangan pada salah satu faktor (Arsyad, 2010).

Berlandaskan kondisi Indonesia secara umum seperti uraian di atas, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki suatu kekhususan tersendiri dalam hal pengelolaan pemerintahannya. Hal ini juga akan berpengaruh pada pola pembangunan ekonomi di masing-masing wilayahnya. Salah satu daerah yang paling berpengaruh menunjang perekonomian di Provinsi DIY adalah Kabupaten Sleman. Secara geografis, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur dan berada di lereng Gunung Merapi. Hal ini secara tidak langsung menjadikan Kabupaten Sleman sebagai suatu daerah yang sangat berperan bagi pembentukan PDRB dan kegiatan perekonomian Provinsi DIY dengan corak pembangunan tersendiri. Di samping kondisi geografis, kondisi demografis wilayah Kabupaten Sleman sangatlah beragam. Beragamnya kondisi demografis ini memberikan informasi

bahwa kegiatan perekonomian di Kabupaten Sleman juga sangat beragam karena terdiri dari banyak masyarakat dari berbagai corak.

Berdasarkan hal tersebut, agar ke depannya proses transformasi struktural seperti yang dijelaskan di atas tidak menimbulkan masalah, maka diperlukanlah kajian mengenai proyeksi indikator makroekonomi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang. Indikator makroekonomi yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan pengambilan kebijakan adalah PDRB, ketenagakerjaan, *incremental capital output ratio* (ICOR), inflasi, kemiskinan, dan ketimpangan (indeks Williamson). Gambaran mengenai rerata dari masing-masing indikator makroekonomi tersebut selama kurun waktu 2014-2017 diperlihatkan oleh tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Rerata Indikator Makroekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2014-2017

Indikator Makro Ekonomi	Rerata 2014-2017	Rerata Laju Pertumbuhan 2014-2017 (%)
PDRB (juta Rp)	28,885,187.18	5.27
Penduduk Bekerja (jiwa)	448,375	4.87
ICOR	6.45	(0.24)
Inflasi (%)	4.04	(1.39)
Kemiskinan (jiwa)	327,368	(3.09)
Ketimpangan (Indeks Williamson)	0.4502	(8.92)

Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara umum rerata indikator makroekonomi di Kabupaten Sleman telah menunjukkan hasil yang cukup baik. PDRB Kabupaten Sleman tercatat selama kurun waktu 2014-2017 mampu tumbuh sebesar 5,27%. Hal ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman bergerak ke arah yang sangat baik dengan rerata pertumbuhan selama periodisasi tersebut sebesar 5,27%. Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja pada berbagai sektor baik laki-laki maupun perempuan selama kurun waktu 2014-2017 tumbuh sebesar 4,87%. Nilai ICOR juga dapat diturunkan dengan rerata penurunan sebesar 0,24%. Penurunan nilai ICOR terhadap perekonomian adalah sesuatu yang positif, karena jumlah investasi yang dialokasikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lebih cenderung

menurun. Inflasi di Kabupaten Sleman tercatat mengalami penurunan sebesar 1,39% selama rentang waktu 2014-2017. Penurunan serupa juga terjadi pada jumlah penduduk miskin dan ketimpangan wilayah dengan laju penurunan selama kurun waktu 2014-2017 masing-masing sebesar 3,09% dan 8,92%.

Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, agar tercipta kondisi struktural perekonomian yang lebih baik pada masa yang akan datang, diperlukanlah suatu perencanaan terhadap indikator-indikator makroekonomi tersebut. Perencanaan terhadap indikator makroekonomi yang akan dilakukan adalah dengan memproyeksikan angka-angka yang ada pada masing-masing indikator makroekonomi untuk periode tahun 2019-2026. Hasil dari proyeksi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 2019-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan hasil perhitungan mengenai proyeksi indikator makroekonomi Kabupaten Sleman selama kurun waktu 2019-2026. Hasil proyeksi indikator makroekonomi ini diharapkan dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Memproyeksi dan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman tahun 2019-2026.
2. Memproyeksi dan menganalisis kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman tahun 2019-2026.
3. Memproyeksi dan menganalisis nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Sleman tahun 2019-2026.
4. Memproyeksi dan menganalisis inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Sleman tahun 2019-2026.
5. Memproyeksi dan menganalisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman tahun 2019-2026.

6. Memproyeksi dan menganalisis ketimpangan wilayah di Kabupaten Sleman tahun 2019-2026.
7. Memproyeksi dan menganalisis kondisi sektoral perekonomian di Kabupaten Sleman tahun 2019-2026.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dalam kegiatan ini lebih menekankan pada kajian terhadap proyeksi indikator makroekonomi Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2019-2026. Di samping itu, ruang lingkup pada kajian ini juga menekankan pada model pembangunan yang dapat mengatasi kemiskinan, sub sektor yang dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Sleman, dan model terbaik untuk mengatasi ketimpangan wilayah di Kabupaten Sleman.

1.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proyeksi indikator makroekonomi Kabupaten Sleman selama periode tahun 2019-2026.
2. Untuk mendapatkan model terbaik yang dapat mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mendapatkan informasi mengenai sub sektor yang dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Sleman.
4. Untuk mendapatkan model terbaik bagi dalam rangka mengatasi ketimpangan wilayah di Kabupaten Sleman

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kawasan Strategis Nasional
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2019
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025

1.6. Kerangka Penyusunan

Kerangka penyusunan laporan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini antara lain berisi mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, sasaran, dasar hukum, dan kerangka penyusunan

BAB II Kajian Pustaka

Bagian ini berisi mengenai teori variabel makroekonomi dan analisis sektoral ekonomi

BAB III Metodologi Penelitian

Bagian ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan, data serta alat analisis yang digunakan

BAB IV Analisis Data

Bagian ini berisi analisis proyeksi variabel makroekonomi dan analisis proyeksi sektoral ekonomi Kabupaten Sleman

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini berisi tentang arah strategi, kebijakan, program dan kegiatan terkait Analisis Proyeksi Variabel Makroekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

BAB VI Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah adalah dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi wilayah mencerminkan pergerakan barang dan jasa dalam satu periode yang dicerminkan dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Adapun pembangunan daerah dilaksanakan guna meminimalisir ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tujuan pembangunan sendiri haruslah mencakup sasaran berikut, yakni : usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah agar pembangunan antar daerah merata, pengarahannya pembangunan daerah sesuai kemampuan aspirasi serta potensi daerah untuk kepentingan perkembangan nasional maupun daerah itu sendiri, lanjut mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar supaya terjalin ikatan ekonomi yang kuat antar daerah guna menokohkan kesatuan ekonomi nasional, kemudian yang terakhir yakni membina daerah-daerah minus, perbatasan serta tanah kritis dengan program khusus (Sanusi, 1987) dalam Arsyad (2010).

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Sjafrizal, 2013). Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitikberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2005). Sedangkan menurut BPS (2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pemahaman mengenai konsep PDRB di atas, maka untuk menyusun proyeksi PDRB yang dapat digunakan untuk meramalkan kondisi perekonomian suatu wilayah pada masa yang akan datang, digunakanlah konsep PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini lebih realistis mengingat pengukuran nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya.

2.1.2 Tenaga Kerja

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya yaitu bahan pokok peralatan gedung, tenaga kerja, mesin dan modal yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi input manusia dan non manusia (Mankiw, 2009).

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Manulang, 2010).

Menurut Simanjuntak (2001) dalam Rusli (2008), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.

Mulyadi (2014) juga memberikan definisi tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Sedangkan menurut Murti *et all* (2014), tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun. Konsep inilah yang digunakan untuk merumuskan proyeksi tentang kondisi ketenagakerjaan dalam kajian ini.

2.1.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Konsep ICOR pada awalnya dikembangkan oleh Sir Ray Harrod dan Evsey Domar yang lebih dikenal dengan Harrod-Domar Model. Pada intinya teori ini menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan stok kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Semakin tinggi peningkatan stok kapasitas produksi (ΔK) semakin tinggi pula tambahan output (ΔY) yang dapat dihasilkan (Nazara, S, 1997) dalam Arsyad (2010).

Menurut Arief, S, (1993) dalam Arsyad (2010) teori ICOR dapat diukur melalui bentuk fisik ataupun nilai. Namun untuk memudahkan dalam praktek perhitungan ICOR selalu dilakukan dalam bentuk nilai, bukan merupakan suatu hal mudah untuk memperkirakan koefisien ICOR guna mendapatkan gambaran tentang kebutuhan investasi pada masa yang akan datang. Penyebabnya karena keadaan koefisien tersebut tidak hanya ditentukan oleh investasi yang ditanamkan saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh tingkat penerapan dan perkembangan teknologi dalam proses produksi seperti : kapasitas produksi yang digunakan. Sebenarnya tambahan output tidak hanya disebabkan oleh investasi yang ditanamkan, akan tetapi juga oleh faktor-faktor lain diluar investasi seperti tambahan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Tetapi dalam penerapannya untuk menghitung ICOR dipakai asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor diluar investasi dianggap konstan.

2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk naik secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lainnya. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya dalam kurun waktu sekali saja tidak bisa disebut inflasi (Boediono, 1988).

Kenaikan harga dari masing-masing barang tidak perlu sama (baik secara mutlak maupun persentasenya). Demikian pula waktu kenaikannya tidak perlu bersamaan. Yang penting adalah kenaikan harga umum barang tersebut terjadi secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan harga dapat diukur menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah : indeks harga konsumen (*consumer price index*), indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), GNP deflator (Nopirin, 2000).

Menurut Nopirin (2000) laju inflasi dapat berbeda antara suatu negara dengan negara lain atau dalam suatu negara untuk waktu yang berbeda. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan. Namun, kenaikan upah berjalan lambat dengan tidak mengiringi kenaikan harga-harga. Sehingga nilai uang turun, dan menjadi tidak merata. Efek inflasi yang menguntungkan juga bisa terjadi contohnya adalah serikat buruh yang kuat kadang berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan prosentase lebih besar dari laju inflasi (Sukirno, 2006).

Inflasi yang tinggi tingkatannya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak menguntungkan. Permintaan berbagai macam barang yang naik akan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu (Nopirin, 2000). Menurut Sukirno (2011) beberapa kebijakan mengatasi inflasi adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan fiskal yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
- b. Kebijakan moneter yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.

- c. Dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.

2.1.5 Kemiskinan

Menurut Chambers (1998) dalam Arsyad (2010) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1. Kemiskinan (*proper*), 2. Ketidakberdayaan (*powerless*), 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4. Ketergantungan (*dependence*), dan 5. Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan bukan hanya kekurangan uang ataupun tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti: keterbatasan sumber daya, tingkat kesehatan rendah, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi dengan empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu: 1. Kemiskinan Absolut: Bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; 2. Kemiskinan Relatif: Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; 3. Kemiskinan Kultural: Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; 4. Kemiskinan Struktural: Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

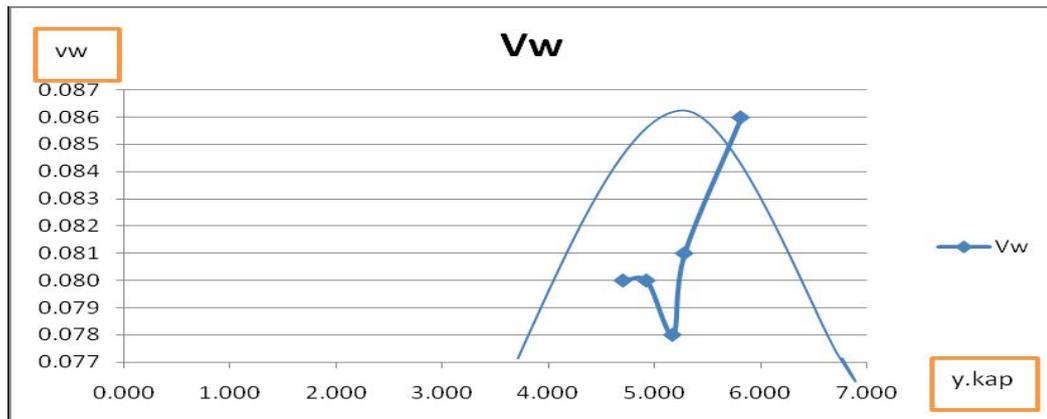
Sharp, *et al* (1996) dalam Kuncoro (2004) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro

kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2004) yang mengatakan: "*a poor country is poor because it is poor*" (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2004).

2.1.6 Ketimpangan Wilayah

Simon Kuznets dalam Kuncoro (2004) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai maka distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan akan merata. Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.



Gambar 2.1.
Hipotesis U Terbalik Simon Kuznets

Simon Kuznet mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut seperti digambarkan dalam kurva Kuznet pada gambar 2.1, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan, namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi berkorelasi negatif. Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang ditemui hampir diseluruh negara maju, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

Menurut Syafrizal (2013), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan perbedaan kondisi

demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga tiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Menurut hipotesa Neo-Klasik, dalam proses pembangunan awalnya ketimpangan akan meningkat, proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan masih terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun (Syafriзал, 2013). Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang sudah maju. Selain dampak positif dari adanya ketimpangan dalam pembangunan, dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya ketimpangan pembangunan yaitu dengan adanya ketimpangan maka akan terjadi inefisiensi ekonomi, sehingga melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dianggap tidaklah adil (Todaro, 2004).

Menurut Arsyad (2004) terdapat 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita,
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang,
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah,
4. Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran,
5. Rendahnya mobilitas sosial,
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis,

7. Kondisi memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap ekspor negara yang sedang berkembang,
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

2.1.7 Analisis Komoditas Unggulan (*Location Quotient* / LQ)

Menurut Hood(1998), *Location Quotient*(LQ) adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada bentuk barang-barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (Tarigan,2005).

Teori ekonomi basis mengklarifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor nonbasis. Deliniasi wilayah dilakukan berdasarkan konsep-konsep perwilayahan yaitu konsep homogenitas, nodalitas dan konsep administrasi. Dijelaskan oleh Sjafrizal., (2013) bahwa yang dimaksud kegiatan basis merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor ke luar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional. Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat menentukan dalam pertumbuhan basis suatu wilayah. Sedangkan kegiatan non-basis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Konsep swasembada, mandiri,

kesejahteraan dan kualitas hidup sangat menentukan dalam kegiatan non basis ini. Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sector suatu kegiatan ekonomi (industri). Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan. Dalam prakteknya penggunaan pendekatan LQ meluas tidak terbatas pada bahasan ekonomi saja akan tetapi juga dimanfaatkan untuk menentukan sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan potensinya.

2.1.8 Analisis *Shift Share* (SS)

Dinamika perkembangan sektor ekonomi dapat ditelaah dengan pendekatan *shift share analysis* (SSA). Pendekatan ini diperkenalkan pertama kali oleh Dunn tahun 1960 untuk menjelaskan perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor secara nasional, regional dan lokal (Tarigan,2005). Pendekatan ini juga digunakan oleh Perloff *et al.* (1960) dalam Sjafrizal.(2013) untuk studi yang berkaitan dengan data ketenaga-kerjaan. Teknik ini banyak digunakan dalam menganalisis dampak pertumbuhan regional, khususnya pertumbuhan lapangan kerja, diterapkan untuk menggambarkan tren pertumbuhan historis, memperkirakan pertumbuhan regional dan menganalisis efek dari inisiatif kebijakan serta mengembangkan perencanaan strategis untuk komunitas (Tarigan,2005).

Menurut Esteban-Marquillas (1972) dalam Sjafrizal. (2013), analisis *shift share* meskipun memiliki karakter dasar, namun sukses di kalangan ekonomi spesialis regional. Menurut Arsyad (2010), analisis *shift share* bertujuan untuk menentukan kinerja perekonomian daerah. Teknik analisis *shift share* membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh: pertumbuhan nasional (N), industri mix/pertumbuhan proporsional (M), dan keunggulan kompetitif (C). Menurut Tarigan (2005), analisis *shift share* membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor

(industri) di daerah dengan nasional. Lebih lanjut Susilawati (2014) melaporkan bahwa teknik analisis *shift share* membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh pertumbuhan nasional (N), industri mix/bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif (C).

Analisis *shift share* digunakan untuk melihat kecenderungan transformasi struktur perekonomian wilayah. Analisis ini mengasumsikan pertumbuhan suatu wilayah dapat dibagi ke dalam tiga komponen. Pertama komponen pertumbuhan provinsi (*national/ provincial growth component* atau *regional share*) Hal ini adalah untuk melihat struktur atau posisi relatif suatu daerah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di wilayah yang menaunginya. *Share regional* menggambarkan perubahan output suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan secara umum, perubahan kebijakan ekonomi secara nasional atau provinsi atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh sektor di seluruh wilayah secara seragam. Komponen ini terjadi misalnya karena *tren* inflasi ataupun karena kebijakan perpajakan. Kedua pertumbuhan sektoral (*industrial mix component* atau *proportionally shift*), merupakan alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan produksi suatu wilayah lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan produksi nasional karena tingginya konsentrasi industri (sektor) regional.

Proportionally Shift (PS) ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan permintaan akhir, ketersediaan bahan baku, dan kebijakan sektoral. Selain itu komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan ketersediaan bahan mentah, perbedaan kebijakan industri dan perbedaan struktur, dan keragaman pasar. Ketiga pertumbuhan daya saing wilayah (*competitive effect component* atau *different shift*). *Different shift* dapat mengukur daya saing suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah lain. *Different shift* terjadi karena peningkatan atau penurunan output di suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar input dan output, maupun infrastruktur ekonomi.

2.1.9 Analisis Input-Output

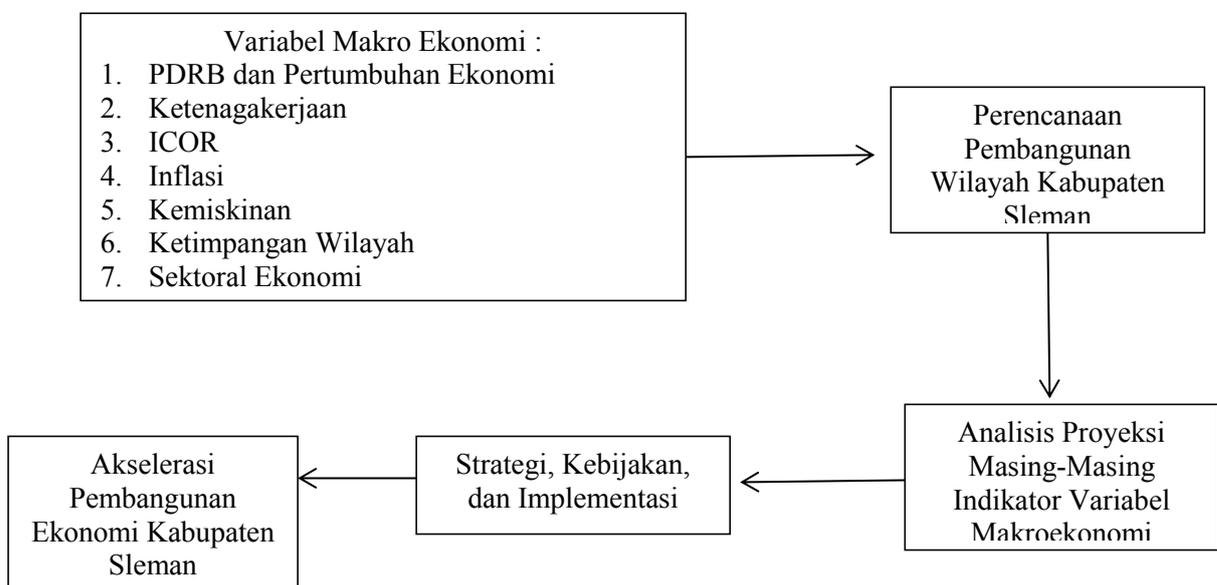
Analisis I-O merupakan suatu model yang sederhana, analisis dan empiris terperinci yang dapat digunakan untuk peramalan (*forecasting*) dan simulasi terhadap dampak ekonomi dan alternatif kebijaksanaan ekonomi. Model ini juga dapat digunakan dalam studi dari berbagai hal antara lain seperti : energi, lingkungan, perubahan teknologi dan pengembangan ekonomi regional. Tabel I-O memberikan suatu pemerian yang menyeluruh dan terperinci tentang struktur ekonomi. Analisis I-O juga digunakan untuk analisis ongkos-harga. Hubungan I-O dalam tabel menunjukkan struktur ongkos dan harga dari setiap industri dan mampu mengukur dampak secara langsung, tidak langsung, induktif dan perubahan harga pada tiap industri pada setiap tahun tertentu. Berbagai macam multiplier dapat dihitung berdasarkan Tabel I-O. Analisis ini dikaitkan dengan pengukuran dampak berjumlah terhadap kesempatan kerja (*employment*), pendapatan (*income* atau *output*) yang dihasilkan dari suatu perubahan tertentu dalam stimulasi eksogen misalnya investasi (Miernyk, 1982).

Tabel I-O di Indonesia terdiri dari agregasi sektor 66 x 66 dan 19 x 19. Tabel I-O disusun dari suatu survei yang didasarkan pada data susunan dan masukan, keluaran, margin perdagangan, transportasi dan lain-lain. Data ini dikumpulkan dari lembaga pemerintah dan swasta pada tingkat nasional. Klasifikasi sektor dalam Tabel I-O di Indonesia didasarkan pada klasifikasi bidang usaha yang dikeluarkan ISIC (*The International Standard Industrial Classification*). Dalam sistem ini, produksi domestik diklasifikasikan atas dasar unit-unit komoditas atau aktivitas. Sebagai contoh, antarsektor pertanian, pertambangan, listrik dan pengolahan bahan makanan, produksi diukur dalam nilai moneter dan barang yang diproduksi. Sedangkan, untuk antarsektor lainnya, misalnya : konstruksi atau bangunan, transportasi dan lain-lain klasifikasi didasarkan pada aktivitas sektor yang bersangkutan. Sektor pemerintah yang tidak memproduksi barang, tetapi mempunyai dampak ekonomi yang dampaknya ini diukur dengan antarunit kelembagaan. Impor dan ekspor antarbarang tidak diadakan klasifikasi terpisah, tetapi diklasifikasikan dalam antarsektor yang lain

(Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, 1971). Nilai Output antarsektor berjumlah membentuk output berjumlah atau *total domestic output*. Setiap output yang dihasilkan dalam batas geografis Indonesia dinyatakan sebagai output domestik baik dihasilkan oleh penduduk warga negara ataupun orang asing.

2.2 Kerangka Konseptual Pemikiran

Kerangka konseptual dalam analisis proyeksi variabel makroekonomi Kabupaten Sleman diperlihatkan oleh gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.2 dapat dilihat bahwa terdapat enam indikator variabel makroekonomi (PDRB dan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, ICOR, inflasi, kemiskinan, dan ketimpangan wilayah) dan analisis sektoral ekonomi. Agar pada tahun-tahun mendatang diperoleh suatu keadaan yang lebih baik maka dilakukanlah model perencanaan berupa proyeksi dari masing-masing indikator makroekonomi tersebut. Langkah selanjutnya agar dapat mencapai target sesuai dengan proyeksi yang telah dilakukan adalah dengan menggunakan strategi dan kebijakan berupa implementasi program disertai dengan analisis SWOT. Hasil dari strategi yang diberikan inilah yang diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman untuk tahun-tahun mendatang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Konsep dan Definisi

Variabel makroekonomi merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan oleh pemerintah sebagai acuan utama dalam melakukan pembangunan ekonomi. Variabel makroekonomi yang menyangkut pembangunan ekonomi dalam kajian ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), inflasi, kemiskinan, dan ketimpangan wilayah. Di samping itu juga dilakukan analisis sektoral terhadap sektor pembentuk PDRB dengan melakukan analisis sektor basis dan non basis, serta analisis *shift-share*. Baik analisis variabel makroekonomi maupun analisis sektoral ekonomi semua dilakukan proyeksi selama kurun waktu 2019-2026. Hasil dari proyeksi inilah yang diharapkan dapat digunakan sebagai model perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Sleman ke depannya.

3.2 Data dan Sumber Data

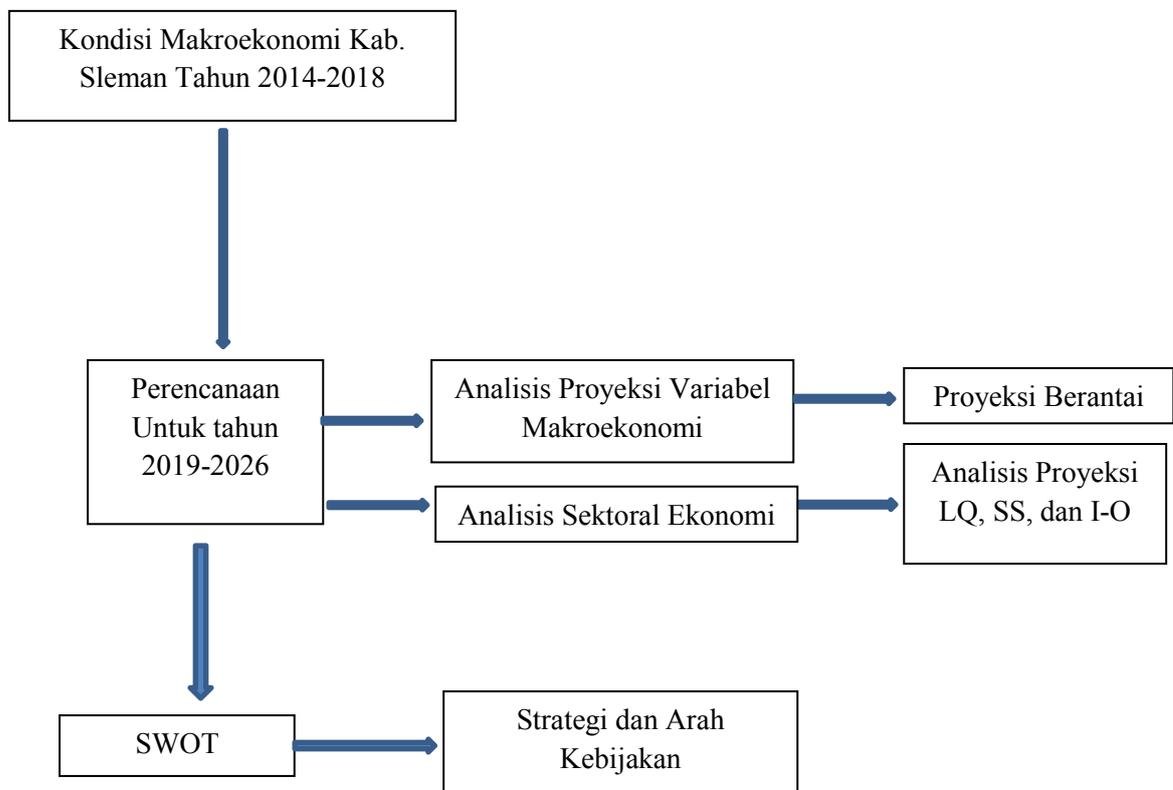
Tujuan penelitian ini akan dicapai dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui survei dan observasi langsung (*direct observation*) serta studi laporan (*library research*). Data sekunder diperoleh dari beberapa penerbitan, antara lain dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan laporan dari berbagai studi, serta publikasi dari berbagai pihak yang relevan. Adapun jenis data dan sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Skala makro (wilayah) mencakup data pokok tentang: aspek pendapatan, aspek wilayah dan geografis, aspek kependudukan, aspek perekonomian, aspek keuangan daerah, lembaga keuangan, aspek fasilitas pelayanan dan prasarana.
2. Skala mikro (obyek kajian) mencakup data pokok kondisi riil wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman yang terkait dengan variabel makroekonomi.

3.3 Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penyusunan Analisis Proyeksi Variabel Makroekonomi Kabupaten Sleman, data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan kompilasi data (primer dan sekunder) terkait variabel makroekonomi dan sektoral ekonomi.
2. Analisis deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang dianalisis menggunakan proyeksi berantai untuk mengetahui nilai dari masing-masing variabel makroekonomi yang dianalisis, *Location Quotient analysis*, analisis *shift share*, dan analisis Input-Output (I-O) untuk mengetahui perbandingan relatif antara kemampuan sektor beserta keterkaitan (*forward and backward linkage*) setiap sektor.



Gambar 3.1.
Alur Metode Analisis Data

3. Setelah diketahui hasil proyeksi dari masing-masing variabel makroekonomi proyeksi dari analisis sektoral ekonomi selanjutnya dilakukan identifikasi terkait strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT agar dapat diberikan rekomendasi kebijakan serta solusi terhadap permasalahan tersebut.dalam kurun waktu 2019-2026
4. Selanjutnya digunakan untuk penetapan arah kebijakan, strategi, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2026 yang akan datang dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi Tahapan-tahapan analisis tersebut ditunjukkan oleh kerangka pemikiran gambar 3.1 :

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

1. Proyeksi adalah hasil perkiraan yang terjadi di masa yang akan datang. Dalam hal ini proyeksi yang digunakan adalah proyeksi berantai.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya PDRB hasil proyeksi yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.
3. Pertumbuhan ekonomi adalah laju PDRB hasil proyeksi tahun ke i dikurangi dengan laju PDRB hasil proyeksi tahun i-1 yang dinyatakan dalam satuan persen (%).
4. Tenaga kerja terbagi menjadi tiga kategori yaitu jumlah penduduk usia kerja, jumlah penduduk bekerja, dan tingkat pengangguran terbuka. Ketiga kategori tersebut merupakan hasil dari proyeksi yang dilakukan. Jumlah penduduk usiakerja dan jumlah penduduk bekerja menggunakan satuan jiwa, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menggunakan satuan persen.
5. ICOR merupakan hasil dari proyeksi yang diperoleh dengan memformulasikan PDRB hasil proyeksi dengan metode penghitungan ICOR.
6. Inflasi merupakan hasil dari proyeksi yang diperoleh dengan memformulasikan PDRB hasil proyeksi dengan metode penghitungan inflasi yang dinyatakan dalam satuan persen.

7. Kemiskinan merupakan kemiskinan hasil proyeksi yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu proyeksi jumlah penduduk miskin (jiwa), proyeksi persentase kemiskinan terhadap jumlah penduduk (persen), dan proyeksi garis kemiskinan (Rp/Kap/bulan).
8. Ketimpangan merupakan besarnya ketimpangan wilayah setiap kecamatan yang diukur dengan menggunakan Indeks Williamson dengan berbasis pada hasil proyeksi PDRB.
9. Analisis sektoral ekonomi merupakan analisis proyeksi dari masing-masing sektor pembentuk PDRB.
10. Analisis I-O merupakan analisis proyeksi dari masing-masing sektor pembentuk PDRB untuk mengetahui keterkaitan masing-masing sektor.

BAB IV

PEMBAHASAN

Analisis variabel makro Kabupaten Sleman menggunakan proyeksi untuk setiap variabel yang akan dianalisis. Variabel – variabel makro yang dianalisis meliputi proyeksi PDRB ADHK Kabupaten Sleman tahun 2019-2026, proyeksi kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman tahun 2019-2026, proyeksi nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Sleman tahun 2019-2026, proyeksi inflasi Kabupaten Sleman tahun 2019-2026, proyeksi kemiskinan Kabupaten Sleman tahun 2019-2026, proyeksi PDRB per kecamatan dan ketimpangan wilayah (*Williamson Index*) Kabupaten Sleman tahun 2019-2026, serta analisis proyeksi sektoral Kabupaten Sleman tahun 2019-2026.

4.1 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sleman tahun 2019-2026 diperlihatkan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Proyeksi PDRB ADHK Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Sektor PDRB	Proyeksi PDRB (juta Rp)								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rerata
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,095,895.62	2,135,821.79	2,191,590.53	2,263,627.35	2,352,533.27	2,459,030.16	2,583,883.92	2,727,791.68	2,351,271.79
B.Pertambangan dan Penggalian	129,224.19	133,378.64	138,777.33	145,532.99	153,791.28	163,734.75	175,587.87	189,622.93	153,706.25
C.Industri Pengolahan	4,409,876.41	4,670,087.42	4,991,472.30	5,383,929.18	5,860,027.38	6,435,656.30	7,130,874.77	7,971,022.40	5,856,618.27
D.Pengadaan Listrik dan Gas	44,920.34	48,092.96	51,971.21	56,682.57	62,388.57	69,293.65	77,656.77	87,806.80	62,351.61
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,420.41	16,115.48	16,990.50	18,069.14	19,381.54	20,965.75	22,869.43	25,152.06	19,370.54
F.Konstruksi	4,234,119.49	4,595,801.99	5,033,891.32	5,563,605.50	6,204,188.37	6,980,017.51	7,922,061.33	9,069,802.39	6,200,435.99
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,673,835.91	2,867,147.90	3,103,166.46	3,389,708.89	3,736,676.38	4,156,601.53	4,665,367.20	5,283,152.43	3,734,457.09
H.Transportasi dan Pergudangan	2,313,555.75	2,487,893.39	2,700,300.73	2,957,903.13	3,269,721.47	3,647,176.51	4,104,751.50	4,660,864.79	3,267,770.91
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,487,718.57	3,748,919.62	4,067,256.07	4,453,386.95	4,920,807.72	5,486,603.58	6,172,439.13	7,005,861.45	4,917,874.14
J.Informasi dan Komunikasi	3,807,293.20	4,109,481.05	4,476,733.95	4,921,558.92	5,459,782.07	6,111,444.91	6,901,982.49	7,863,776.43	5,456,506.63
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	1,037,968.36	1,112,972.17	1,204,548.29	1,315,729.37	1,450,356.52	1,613,291.64	1,810,696.31	2,050,398.67	1,449,495.17
L.Real Estate	2,873,168.68	3,070,946.74	3,313,043.78	3,607,351.73	3,963,871.86	4,395,259.97	4,917,541.78	5,551,053.26	3,961,529.73
M,N.Jasa Perusahaan	672,832.23	718,345.40	774,110.36	841,934.26	924,107.70	1,023,528.98	1,143,867.00	1,289,775.33	923,562.66
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,054,603.91	2,181,168.76	2,337,077.26	2,527,213.35	2,757,775.18	3,036,600.46	3,373,592.80	3,781,280.32	2,756,164.01
P.Jasa Pendidikan	3,555,717.12	3,807,993.02	4,116,303.46	4,490,799.10	4,944,339.16	5,493,198.73	6,157,997.24	6,964,919.67	4,941,408.44
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	862,587.81	926,319.37	1,004,044.44	1,098,354.81	1,212,532.44	1,350,732.00	1,518,220.62	1,721,693.53	1,211,810.63
R,S,T,U.Jasa lainnya	825,680.23	885,447.42	958,413.86	1,046,997.21	1,154,259.62	1,284,077.06	1,441,361.74	1,632,354.78	1,153,573.99
Produk Domestik Regional Bruto	35,094,417.99	37,515,932.83	40,479,691.52	44,082,384.07	48,446,540.09	53,727,212.96	60,120,751.31	67,876,328.22	48,417,907.37

Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa total PDRB ADHK Kabupaten Sleman secara proyeksi terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2026. Terlihat bahwa total PDRB di tahun 2019 secara proyeksi adalah sebesar 35,094,417.99juta rupiah, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 67,876,328.22juta rupiah di tahun 2026. Secara rerata proyeksi besarnya total PDRB Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2019 hingga 2026 adalah sebesar 48,417,907.37 juta rupiah. Kemudian, jika melihat PDRB setiap sektornya, maka lima sektor dengan nilai PDRB terbesar secara rerata dari tahun 2019 hingga tahun 2026 adalah sektor konstruksi; industri pengolahan; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum;

Besaran nilai PDRB menunjukkan akumulasi total barang dan jasa yang ada di suatu wilayah. Artinya semakin besar nilai PDRB di suatu wilayah maka volatilitas barang dan jasa di suatu wilayah juga akan tinggi. Selanjutnya untuk melihat apakah perekonomian tersebut bergerak atau tidak secara cepat maka digunakanlah pertumbuhan dari PDRB di setiap sektornya. Proyeksi laju PDRB per sektor di Kabupaten Sleman tahun 2019-2026 diperlihatkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
Proyeksi Laju PDRB Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Sektor PDRB	Proyeksi Laju PDRB (%)								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rerata
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.17	1.90	2.61	3.29	3.93	4.53	5.08	5.57	3.51
B.Pertambangan dan Penggalian	2.37	3.21	4.05	4.87	5.67	6.47	7.24	7.99	5.23
C.Industri Pengolahan	4.92	5.90	6.88	7.86	8.84	9.82	10.80	11.78	8.35
D.Pengadaan Listrik dan Gas	6.06	7.06	8.06	9.07	10.07	11.07	12.07	13.07	9.57
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.58	4.51	5.43	6.35	7.26	8.17	9.08	9.98	6.80
F.Konstruksi	7.55	8.54	9.53	10.52	11.51	12.50	13.50	14.49	11.02
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.23	7.23	8.23	9.23	10.24	11.24	12.24	13.24	9.73
H.Transportasi dan Pergudangan	6.53	7.54	8.54	9.54	10.54	11.54	12.55	13.55	10.04
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.49	7.49	8.49	9.49	10.50	11.50	12.50	13.50	9.99
J.Informasi dan Komunikasi	6.94	7.94	8.94	9.94	10.94	11.94	12.94	13.94	10.44
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	6.22	7.23	8.23	9.23	10.23	11.23	12.24	13.24	9.73
L.Real Estate	5.88	6.88	7.88	8.88	9.88	10.88	11.88	12.88	9.38
M,N.Jasa Perusahaan	5.77	6.76	7.76	8.76	9.76	10.76	11.76	12.76	9.26
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.17	6.16	7.15	8.14	9.12	10.11	11.10	12.08	8.63
P.Jasa Pendidikan	6.09	7.09	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	9.60
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.39	7.39	8.39	9.39	10.40	11.40	12.40	13.40	9.89
R,S,T,U.Jasa lainnya	6.24	7.24	8.24	9.24	10.24	11.25	12.25	13.25	9.74
Produk Domestik Regional Bruto	5.90	6.90	7.90	8.90	9.90	10.90	11.90	12.90	9.40

Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa terdapat lima sektor PDRB dengan rerata nilai pertumbuhan tertinggi. Kelima sektor tersebut adalah sektor konstruksi; informasi dan komunikasi; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Masing-masing sektor tersebut memiliki nilai 11,02%; 10,44%; 10,04%; 9,99%; dan 9,89%. Jika melihat kelima sektor dengan laju PDRB tertinggi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun-tahun mendatang sektor konstruksi akan mengalami laju pertumbuhan yang cukup signifikan. Letak geografis Kabupaten Sleman yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) ditambah dengan konsentrasi penduduk dan bisnis yang semakin massif

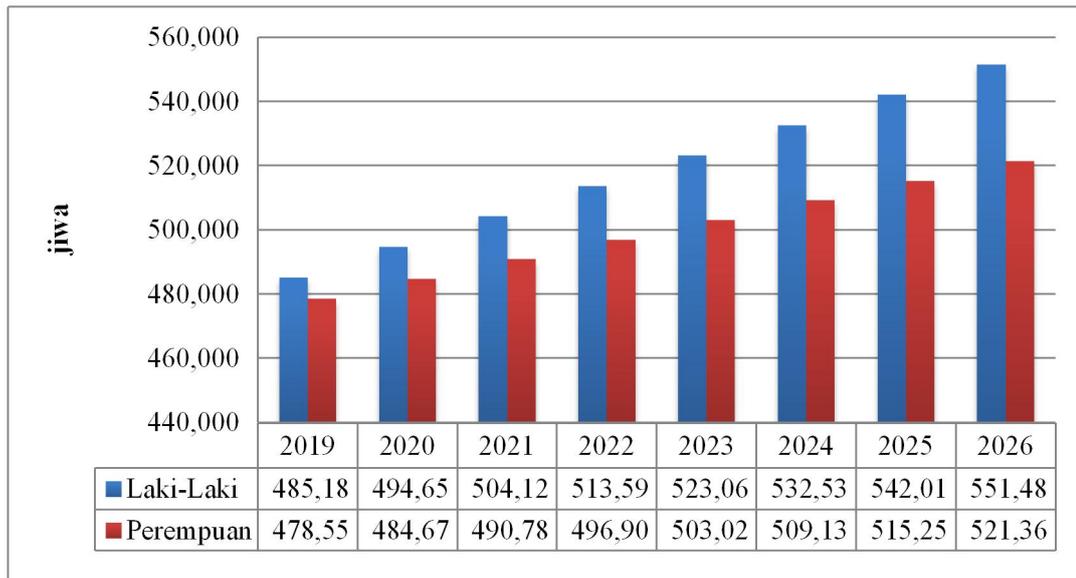
menuntut semakin tingginya kebutuhan akan bangunan. Hal inilah yang diprediksi akan meningkatkan laju pertumbuhan sektor konstruksi di masa mendatang. Di samping itu karena semakin tingginya jumlah penduduk akibat natalitas maupun migrasi bersamaan dengan tingginya aktifitas perekonomian wilayah akan menyebabkan kebutuhan akomodasi serta makan dan minum akan semakin meningkat. Hal inilah yang menyebabkan laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga diprediksi akan meningkat di tahun-tahun mendatang.

Terakhir, secara rerata proyeksi laju PDRB (pertumbuhan ekonomi) di Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 2019-2026 berada pada kisaran 9,40%. Hal tersebut dapat dipahami bahwa di tahun-tahun mendatang pertumbuhan ekonomi akan semakin bergerak mengingat Kabupaten Sleman merupakan penyumbang terbesar perekonomian di Provinsi DIY.

4.2 Proyeksi Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Proyeksi kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman untuk rentang waktu 2019 hingga 2026 menggunakan sumber data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman yaitu data ketenagakerjaan yang mana dari sumber data tersebut diproyeksikan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman.

Proyeksi ketenagakerjaan pada uraian ini terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah proyeksi penduduk usia kerja, kedua adalah proyeksi jumlah penduduk yang bekerja, dan ketiga adalah proyeksi tingkat pengaguran terbuka. Selanjutnya, proyeksi penduduk usia kerja Kabupaten Sleman tahun 2019-2026 diperlihatkan dalam grafik 4.1 berikut.



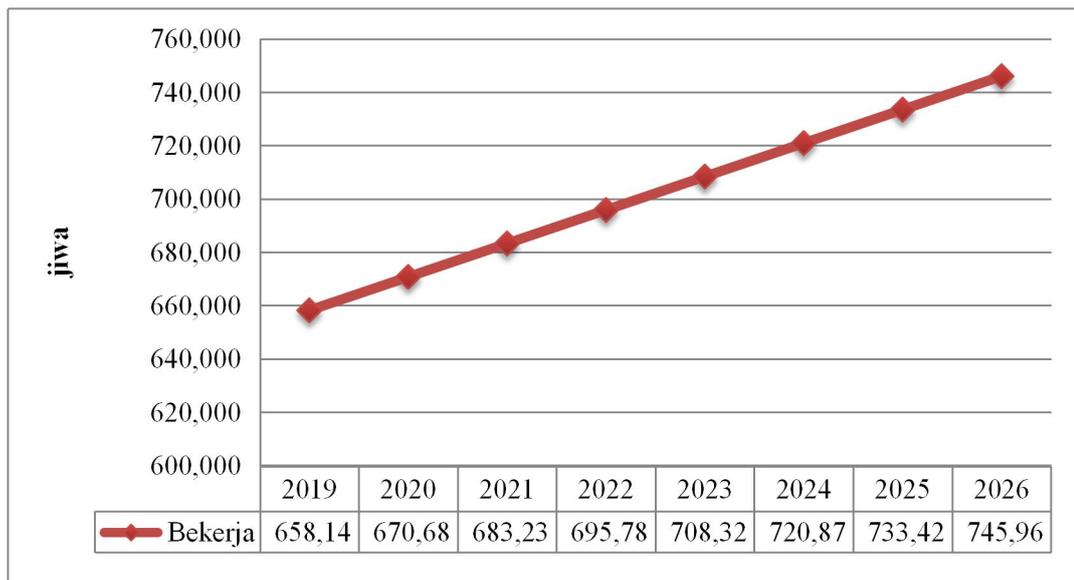
Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Grafik 4.1

Proyeksi Penduduk Usia Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Berdasarkan grafik 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia kerja baik laki-laki maupun perempuan jumlahnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2019, diproyeksikan jumlah penduduk usia kerja laki-laki adalah sebesar 485,1 ribu jiwa meningkat hingga mencapai 551,4 ribu jiwa di tahun 2026. Hal serupa juga terjadi pada penduduk usia kerja perempuan yang meningkat dari 478,5 ribu jiwa di tahun 2019, menjadi 521,3 ribu jiwa di tahun 2026. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja baik laki-laki maupun perempuan ditengarai akibat tingginya jumlah penduduk. Dengan kata lain, semakin tinggi jumlah penduduk secara keseluruhan maka secara tidak langsung juga akan menambah populasi dari penduduk usia kerja.

Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Sleman untuk tahun 2019-2026 diproyeksikan juga akan meningkat. Proyeksi jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tahun 2019-2026 diperlihatkan dalam grafik 4.2 berikut.



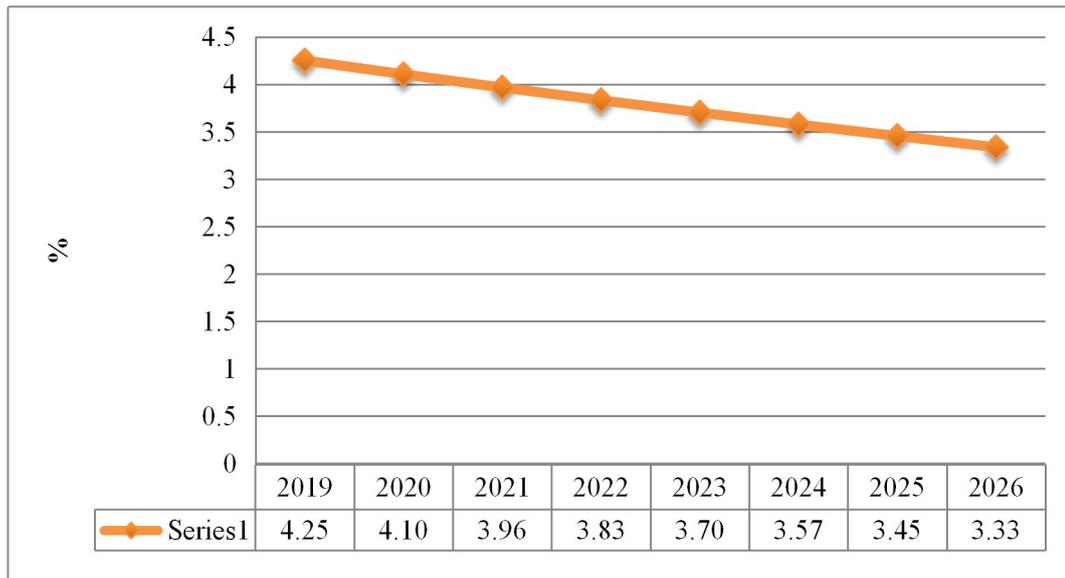
Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Grafik 4.2

Proyeksi Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Berdasarkan grafik 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Sleman untuk tahun 2019-2026 diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari semula 658,14 ribu jiwa di tahun 2019 menjadi 745,96 ribu jiwa di tahun 2026 dengan rerata sebesar 702,054 ribu jiwa. Terus meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja ini diprediksi sebagai akibat dari semakin masifnya sektor UMKM. Seperti yang telah diketahui bahwa sektor UMKM dengan berbasis ekonomi kreatif jumlahnya semakin banyak. Hal inilah yang ditengarai menjadi penyebab tingginya jumlah penduduk yang bekerja di masa mendatang.

Selanjutnya, dari sisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sleman untuk tahun 2019-2026 diproyeksikan akan terus menurun. Proyeksi TPT di Kabupaten Sleman tahun 2029-2026 diperlihatkan dalam grafik 4.3.



Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Grafik 4.3

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Berdasarkan grafik 4.3 dapat dilihat bahwa TPT di Kabupaten Sleman untuk tahun 2019-2026 diproyeksikan akan terus mengalami penurunan. Tercatat TPT tahun 2019 diproyeksikan mencapai 4,25% turun menjadi 3,33% di tahun 2026 atau dengan rata-rata TPT sebesar 3.78%. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penurunan TPT juga sebagai akibat dari semakin masifnya jumlah UMKM yang merambah pada sektor ekonomi kreatif. Agar hal tersebut dapat terlaksana diperlukan suatu terobosan baru untuk meningkatkan serapan kerja paa sektor UMKM.

4.3 Proyeksi Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) merupakan suatu ukuran tentang efisiensi investasi untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin besar nilai ICOR maka diperlukan pula tambahan nilai investasi yang semakin besar untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Komponen yang digunakan sebagai bahan analisis ICOR adalah total PDRB, nilai investasi, dan laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya,

proyeksi besaran ICOR Kabupaten Sleman tahun 2019-2026 diperlihatkan oleh tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Investasi dan Nilai ICOR
Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Tahun	PDRB ADHK (juta Rp)	Δ PDRB	Nilai Investasi (juta Rp)	LPE (%)	ICOR**
2019*	35,094,417.99	1,955,213.09	11,698,694.34	5.90	5.71
2020*	37,515,932.83	2,421,514.84	12,314,208.81	6.90	4.86
2021*	40,479,691.52	2,963,758.69	12,962,114.30	7.90	4.18
2022*	44,082,384.07	3,602,692.55	13,644,115.67	8.90	3.62
2023*	48,446,540.09	4,364,156.02	14,362,007.55	9.90	3.14
2024*	53,727,212.96	5,280,672.87	15,117,679.02	10.90	2.74
2025*	60,120,751.31	6,393,538.34	15,913,118.63	11.90	2.38
2026*	67,876,328.22	7,755,576.92	16,750,419.61	12.90	2.06
Rerata	48,417,907.37	4,342,140.42	14,095,294.74	9.40	3.59

Keterangan :

*) Angka Proyeksi

***) ICOR dihitung dengan hanya memasukkan nilai PMTB tanpa delta inventori

Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa secara rerata nilai PDRB Kabupaten Sleman diperkirakan mencapai 48,417,907.37 juta rupiah untuk rentang waktu 2019-2026 dengan perkiraan total nilai investasi secara rerata mencapai 14.095.294,74 juta rupiah atau sekitar 29,12% dari perkiraan total PDRB Kabupaten Sleman. Selanjutnya secara rerata perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman untuk rentang waktu 2019 hingga 2026 adalah sebesar 9,40%. Secara rerata, perkiraan nilai ICOR Kabupaten Sleman untuk rentang waktu 2019-2026 adalah sebesar 3,59. Hal ini dapat dimaknai bahwa untuk mendapatkan 1 unit output diperlukan tambahan input sebesar 3,59 unit.

Selanjutnya jika melihat proyeksi nilai ICOR setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2026 tren ICOR adalah menurun. Hal ini mencerminkan suatu hal yang positif dalam perekonomian mengingat tambahan input yang diperlukan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi relatif berkurang jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk ICOR di tahun 2019 adalah sebesar 5,71, yang dapat dimaknai bahwa untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% diperlukan tambahan investasi sebesar 5,71%. Namun keadaan berbeda justru terjadi di tahun 2026, yaitu nilai ICOR menjadi 2,06, yang dimaknai bahwa untuk

menaikkan 1% pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan tambahan investasi yang lebih kecil yaitu sebesar 2,06%.

4.4 Proyeksi Nilai Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur tingkat/laju inflasi baik secara bulanan (m-o-m) ataupun tahunan (y-o-y). Sedangkan inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan barang secara terus menerus atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang secara kontinu.

Perhitungan proyeksi nilai inflasi didasarkan pada jumlah PDRB baik secara harga konstan maupun harga berlaku. Hasil perhitungan proyeksi inflasi Kabupaten Sleman tahun 2019-2026 diperlihatkan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4
Proyeksi PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Inflasi Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Tahun	ADHB (juta Rp)	ADHK (juta Rp)	Inflasi
2019	47,778,439.68	35,094,417.99	1.29
2020	52,126,277.69	37,515,932.83	1.33
2021	56,869,768.96	40,479,691.52	1.37
2022	62,044,917.93	44,082,384.07	1.42
2023	67,691,005.46	48,446,540.09	1.47
2024	73,850,886.96	53,727,212.96	1.52
2025	80,571,317.68	60,120,751.31	1.57
2026	87,903,307.58	67,876,328.22	1.62
Rerata	66,104,490.24	48,417,907.37	1.45

Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa baik nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK setiap tahunnya diperkirakan terus mengalami kenaikan dengan rata-rata masing-masing sebesar 66,104,490.24 juta rupiah dan 48,417,907.37 juta rupiah. Selanjutnya jika melihat perkiraan besarnya inflasi di Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 2019 hingga 2026, maka nilai inflasi di Kabupaten Sleman memiliki tren naik. Nilai inflasi untuk tahun 2019 adalah sebesar 1,29% diperkirakan naik

menjadi 1,62% di tahun 2026. Secara rerata perkiraan besarnya inflasi di Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 2019 hingga 2026 adalah sebesar 1,45% (y-o-y).

4.5 Proyeksi Kondisi Kemiskinan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Proyeksi kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman tahun 2019-2026 dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman dan garis kemiskinan di Kabupaten Sleman. Gambaran proyeksi kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman tahun 2019-2026 diperlihatkan dalam tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Kondisi Kemiskinan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kap/bulan)
2019	89798	7.31	382,717
2020	86512	6.96	400,325
2021	83345	6.61	418,743
2022	80295	6.29	438,008
2023	77357	5.98	458,160
2024	74526	5.12	479,239
2025	71798	4.39	501,287
2026	69170	3.76	524,350
Rerata	79100	5.80	450354

Sumber : BPS Kabupaten Sleman Tahun 2018, data diolah

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 2019-2026 diperkirakan akan terus mengalami penurunan dari 89.798 jiwa di tahun 2019 menjadi 69.170 jiwa di tahun 2026 dengan rata-rata sebesar 79.100 jiwa. Kondisi tersebut secara langsung menyebabkan persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dalam rentang waktu enam tahun yaitu sebesar 7,31% di tahun 2019 menjadi 3,76% di tahun 2026 dengan perkiraan rata-rata sebesar 5,80%. Selanjutnya garis kemiskinan di Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 2019 hingga 2026 diperkirakan terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp 382.717 kapita/bulan di tahun 2018 menjadi Rp 524.350 kapita/bulan dengan rata-rata sebesar Rp 450.354 kapita/bulan. Kondisi ini menyiratkan bahwa diperkirakan untuk kurun waktu

2019 hingga 2026 masyarakat di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan taraf hidup yang cukup signifikan setiap tahunnya.

4.6 Proyeksi PDRB Per Kecamatan dan Indeks Williamson Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Pertumbuhan ekonomi yang begitu massif di suatu wilayah pada awal-awal periode akan menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah salah satunya bersumber dari perbedaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, kondisi kependudukan, hingga pembangunan di wilayah tersebut. Sebelum melihat kondisi ketimpangan antar kecamatan dan Kabupaten Sleman secara menyeluruh, maka analisis pertama yang akan dilakukan adalah melihat perkiraan total nilai PDRB masing-masing kecamatan di Kabupaten Sleman. Besarnya perkiraan total nilai PDRB per kecamatan di Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 2019 hingga tahun 2026 diperlihatkan dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Proyeksi PDRB Per Kecamatan di Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2019-2026

Kecamatan	Proyeksi PDRB ADHK (juta Rp)								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rerata
Moyudan	839,738.09	864,995.24	891,012.05	917,811.39	945,416.77	973,852.46	1,003,143.42	1,033,315.38	933,660.60
Minggir	823,825.76	855,292.35	887,960.83	921,877.10	957,088.83	993,645.49	1,031,598.46	1,071,001.07	942,786.23
Seyegan	1,486,820.94	1,547,023.26	1,609,663.21	1,674,839.48	1,742,654.79	1,813,215.98	1,886,634.24	1,963,025.25	1,715,484.64
Godean	2,334,078.24	2,452,447.90	2,576,820.52	2,707,500.52	2,844,807.79	2,989,078.41	3,140,665.53	3,299,940.18	2,793,167.39
Gamping	2,817,658.48	2,967,368.06	3,125,032.10	3,291,073.24	3,465,936.58	3,650,090.87	3,844,029.76	4,048,273.13	3,401,182.78
Mlati	2,858,424.43	3,002,584.14	3,154,014.29	3,313,081.57	3,480,171.13	3,655,687.56	3,840,055.86	4,033,722.46	3,417,217.68
Depok	5,890,296.83	6,249,856.25	6,631,364.14	7,036,160.29	7,465,666.27	7,921,390.44	8,404,933.24	8,917,992.77	7,314,707.53
Berbah	1,321,588.84	1,382,045.82	1,445,268.44	1,511,383.23	1,580,522.48	1,652,824.55	1,728,434.13	1,807,502.53	1,553,696.25
Prambanan	1,173,454.72	1,227,706.24	1,284,465.94	1,343,849.77	1,405,979.04	1,470,980.70	1,538,987.53	1,610,138.48	1,381,945.30
Kalasan	2,384,580.71	2,495,237.74	2,611,029.83	2,732,195.27	2,858,983.43	2,991,655.22	3,130,483.68	3,275,754.50	2,809,990.05
Ngemplak	1,593,402.23	1,646,036.48	1,700,409.38	1,756,578.35	1,814,602.73	1,874,543.81	1,936,464.90	2,000,431.41	1,790,308.66
Ngaglik	2,941,963.96	3,092,172.45	3,250,050.16	3,415,988.67	3,590,399.54	3,773,715.34	3,966,390.73	4,168,903.60	3,524,948.06
Sleman	3,724,525.01	3,913,634.43	4,112,345.71	4,321,146.38	4,540,548.71	4,771,091.00	5,013,338.87	5,267,886.66	4,458,064.60
Tempel	1,153,171.04	1,192,638.63	1,233,457.01	1,275,672.42	1,319,332.65	1,364,487.17	1,411,187.12	1,459,485.38	1,301,178.93
Turi	514,272.32	532,001.53	550,341.94	569,314.63	588,941.38	609,244.76	630,248.08	651,975.47	580,792.51
Pakem	1,003,406.06	1,040,375.58	1,078,707.21	1,118,451.13	1,159,659.38	1,202,385.90	1,246,686.64	1,292,619.60	1,142,786.44
Cangkringan	515,758.39	536,629.33	558,344.84	580,939.10	604,447.68	628,907.57	654,357.26	680,836.81	595,027.62
Kab.									
Sleman	35,094,417.99	37,515,932.83	40,479,691.52	44,082,384.07	48,446,540.09	53,727,212.96	60,120,751.31	67,876,328.22	48,417,907.37

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa PDRB terbesar berada pada wilayah tengah Kabupaten Sleman yang meliputi Kecamatan Depok, Sleman, Gamping, dan Mlati. Kawasan tengah Kabupaten Sleman ini merupakan kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY), yang artinya perputaran ekonomi di wilayah ini cukup tinggi dan pesat jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Kabupaten Sleman. Namun kedepannya, jika melihat nilai PDRB per kecamatan, maka dapat diperkirakan bahwa kedepannya akan terjadi pergeseran (meskipun jumlahnya tidak begitu massif) perekonomian dari kawasan APY ke kawasan-kawasan lain di Kabupaten Sleman mengingat terdapatnya destinasi pariwisata, pusat perbelanjaan, kebudayaan hingga aktivitas pertanian di kawasan-kawasan selain APY.

Setelah melihat perkiraan total nilai PDRB per kecamatan di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 2019-2026, maka dapat pula dilihat kondisi ketimpangan setiap kecamatan di Kabupaten Sleman yang dilihat dari besarnya Indeks Williamson (*Williamson Index*) setiap kecamatan. Nilai Indeks Williamson (IW) berada di kisaran 0-1, yang berarti semakin mendekati 1 maka ketimpangan di wilayah (kecamatan) tersebut semakin besar. Selanjutnya, perkiraan kondisi ketimpangan setiap kecamatan di Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 2019-2026 diperlihatkan dalam tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Ketimpangan (Indeks Williamson) Setiap Kecamatan di Kabupaten Sleman
Tahun 2019-2026

Kecamatan	Indeks Williamson								Rerata
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Moyudan	0.0326	0.0371	0.0418	0.0468	0.0521	0.0577	0.0636	0.0699	0.0502
Minggir	0.0273	0.0305	0.0339	0.0375	0.0413	0.0454	0.0497	0.0542	0.0400
Seyegan	0.0108	0.0144	0.0182	0.0223	0.0267	0.0314	0.0364	0.0418	0.0253
Godean	0.0100	0.0135	0.0173	0.0214	0.0258	0.0305	0.0356	0.0411	0.0244
Gamping	0.0752	0.0824	0.0901	0.0983	0.1071	0.1164	0.1264	0.1370	0.1041
Mlati	0.0848	0.0932	0.1022	0.1118	0.1220	0.1329	0.1446	0.1569	0.1186
Depok	0.0277	0.0271	0.0264	0.0255	0.0245	0.0234	0.0221	0.0206	0.0246
Berbah	0.0809	0.0891	0.0980	0.1074	0.1174	0.1281	0.1395	0.1516	0.1140
Prambanan	0.0571	0.0610	0.0652	0.0695	0.0741	0.0790	0.0842	0.0896	0.0725
Kalasan	0.0549	0.0629	0.0715	0.0807	0.0905	0.1010	0.1122	0.1242	0.0872
Ngemplak	0.0713	0.0807	0.0908	0.1014	0.1127	0.1247	0.1374	0.1509	0.1087
Ngaglik	0.0981	0.1091	0.1209	0.1335	0.1470	0.1614	0.1768	0.1933	0.1425
Sleman	0.1584	0.1618	0.1652	0.1686	0.1720	0.1754	0.1787	0.1820	0.1703
Tempel	0.0672	0.0731	0.0793	0.0858	0.0927	0.1000	0.1077	0.1158	0.0902
Turi	0.0971	0.1031	0.1094	0.1161	0.1231	0.1305	0.1382	0.1464	0.1205
Pakem	0.0418	0.0478	0.0543	0.0611	0.0683	0.0761	0.0843	0.0930	0.0658
Cangkringan	0.0776	0.0825	0.0876	0.0930	0.0987	0.1048	0.1111	0.1178	0.0966
Rerata	0.0631	0.0688	0.0748	0.0812	0.0880	0.0952	0.1028	0.1109	0.0856
STEDEV	0.0373	0.0385	0.0400	0.0417	0.0437	0.0461	0.0487	0.0518	0.0435
Kab. Sleman	0.4963	0.4965	0.4967	0.4968	0.4968	0.4968	0.4969	0.4970	0.4967

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa tiga kecamatan yang diperkirakan selama kurun waktu 2019-2026 memiliki ketimpangan tinggi yaitu Kecamatan Sleman, Ngaglik, dan Turi. Kecamatan Sleman dan Ngaglik merupakan kecamatan yang berada di wilayah tengah Kabupaten Sleman yang merupakan kawasan APY, sedangkan Kecamatan Turi merupakan sentra pertanian salak yang kedepannya memiliki prospek bagus, sehingga potensi ketimpangan akan melebar. Selanjutnya untuk ketimpangan di Kabupaten Sleman secara keseluruhan diperkirakan antara tahun 2019 hingga 2026 ketimpangan yang terjadi adalah sebesar 0,4967. Angka yang cukup besar ini diakibatkan Kabupaten Sleman merupakan kabupaten penyangga Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY dengan perputaran ekonomi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan potensi

ketimpangan di Kabupaten Sleman akan semakin melebar dalam kurun waktu 2019 hingga 2026.

Salah satu faktor penyebab tingginya ketimpangan adalah tingginya laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Selanjutnya rerata perkiraan PDRB kecamatan, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks Williamson Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 2019 hingga 2026 diperlihatkan dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8
Rerata PDRB Kecamatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Williamson
Per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

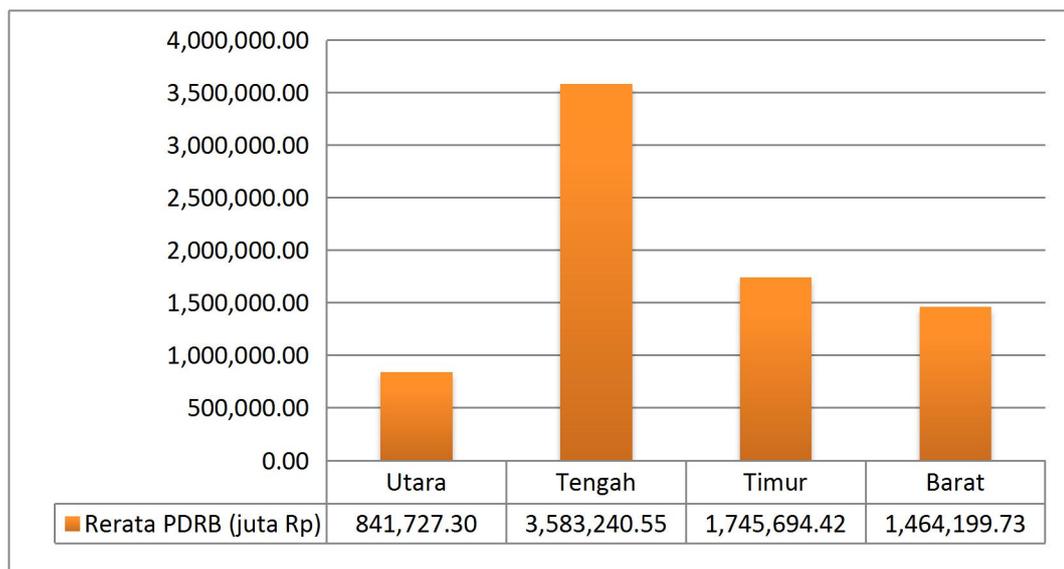
Kecamatan	Rerata PDRB (000 Rp)	Rerata LPE (%)	Rerata IW
Moyudan	879,031.99	3.01	0.0502
Minggir	873,260.28	3.82	0.0400
Seyegan	1,581,660.51	4.05	0.0253
Godean	2,522,846.13	5.07	0.0244
Gamping	3,057,095.08	5.31	0.1041
Mlati	3,088,243.61	5.04	0.1186
Depok	6,470,794.49	6.10	0.0246
Berbah	1,417,430.89	4.57	0.1140
Prambanan	1,259,509.38	4.62	0.0725
Kalasan	2,560,143.00	4.64	0.0872
Ngemplak	1,675,580.03	3.30	0.1087
Ngaglik	3,181,604.49	5.11	0.1425
Sleman	4,026,125.62	5.08	0.1703
Tempel	1,214,880.21	3.42	0.0902
Turi	542,000.96	3.45	0.1205
Pakem	1,061,391.60	3.68	0.0658
Cangkringan	548,636.42	4.05	0.0966
Kab. Sleman	48,417,907.37	9.40	0.4967

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa kecamatan yang berada di APY memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat jika dibandingkan dengan kecamatan yang berada di wilayah lain. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan di kawasan tersebut diperkirakan akan terus melebar hingga tahun 2026.

Selanjutnya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, untuk mempermudah analisis, maka wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, yaitu kawasan utara, tengah, timur, dan barat. Wilayah utara Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Kemudian wilayah tengah Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik,

Ngemplak, Depok, dan Gamping. Sedangkan wilayah timur Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Prambanan, dan Kalasan. Terakhir, wilayah barat Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Minggir, Moyudan, Sayegan, dan Godean. Kemudian, untuk melihat ketimpangan yang terjadi di masing-masing wilayah tersebut, terlebih dahulu akan dilihat seberapa besar perkiraan PDRB untuk setiap wilayah. Besarnya PDRB untuk setiap wilayah di Kabupaten Sleman diperlihatkan oleh grafik 4.4 berikut.



Sumber : Diskominfo Kabupaten Sleman 2018, data diolah

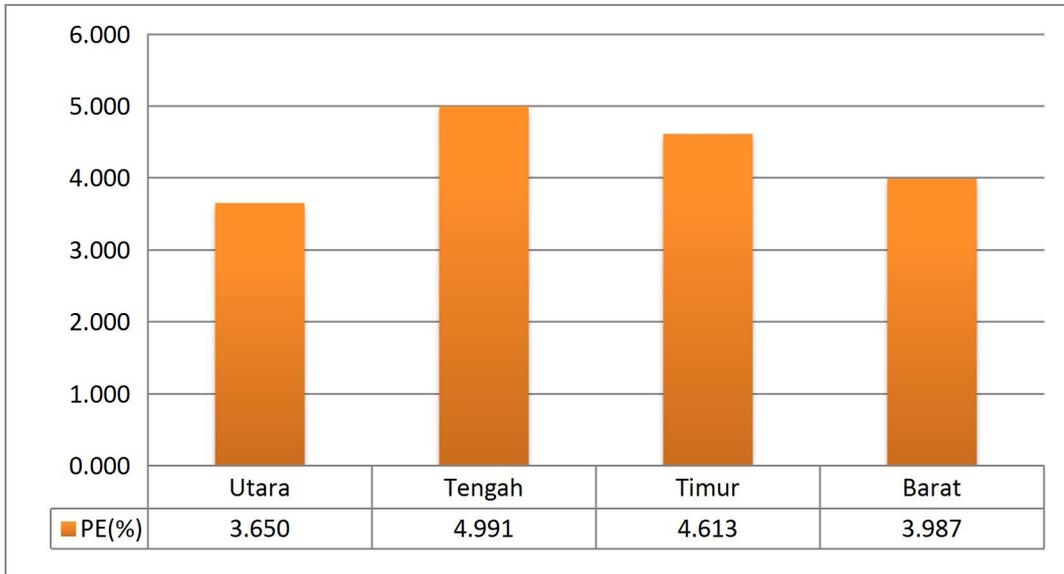
Grafik 4.4

Proyeksi Rerata PDRB Setiap Kawasan di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Berdasarkan grafik 4.4 dapat dilihat bahwa kawasan tengah Kabupaten Sleman memiliki proyeksi rerata PDRB tertinggi jika dibandingkan dengan kawasan lainnya, yaitu sebesar 3,583,240.55 juta rupiah, kemudian disusul oleh kawasan timur sebesar 1,745,694.42 juta rupiah, kawasan barat sebesar 1,464,199.73 juta rupiah, dan terakhir kawasan utara sebesar 841,727.30 juta rupiah. Kawasan tengah memiliki rerata PDRB tinggi dikarenakan termasuk dalam kawasan APY yang sangat memungkinkan terjadinya perputaran ekonomi yang cukup pesat di wilayah tersebut.

Setelah melihat rerata PDRB untuk setiap kawasan, maka komponen lain yang dapat dilihat untuk menganalisis penyebab ketimpangan wilayah adalah

pertumbuhan ekonomi di masing-masing kawasan. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing kawasan Kabupaten Sleman diperlihatkan dalam grafik 4.5 berikut.

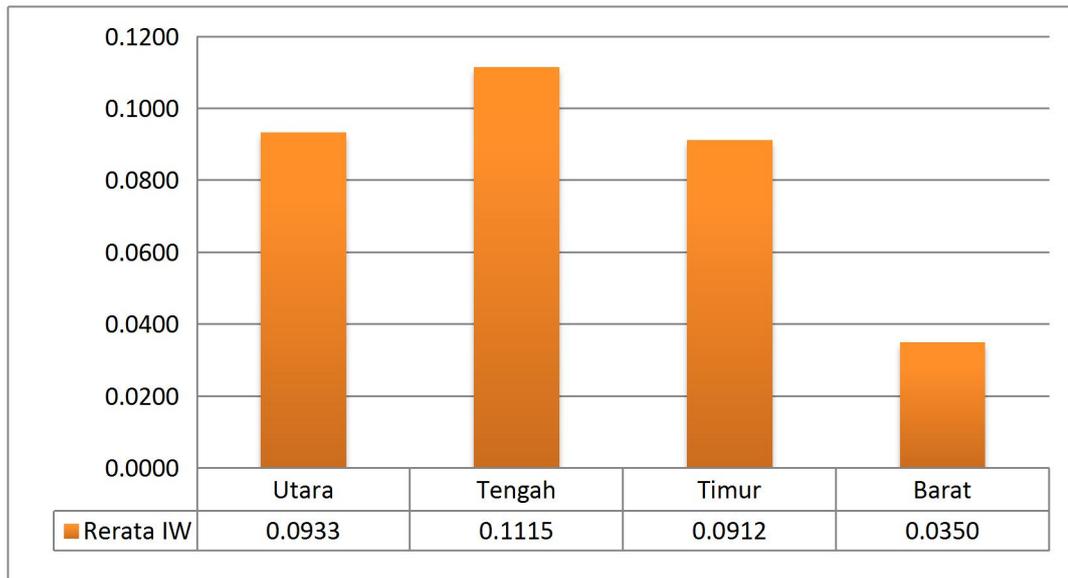


Sumber : Diskominfo Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Grafik 4.5
Proyeksi Rerata Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kawasan
Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Setelah melihat grafik 4.6 dapat disimpulkan bahwa setelah diproyeksikan, rerata pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di wilayah tengah Kabupaten Sleman yang termasuk dalam kawasan APY. Pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua berada di wilayah timur yang merupakan daerah perbatasan Kabupaten Sleman dengan kabupaten Bantul dan Provinsi Jawa Tengah dimana terdapat banyak sekali pusat-pusat kebudayaan yang memberikan daya tarik pariwisata. Selanjutnya disusul oleh wilayah barat yang merupakan kawasan pertanian agraris dimana mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Kemudian terakhir adalah kawasan utara yang merupakan kawasan Gunung Merapi.

Kemudian setelah melihat penyebab timbulnya ketimpangan yaitu PDRB dan pertumbuhan ekonomi, maka secara lebih lanjut akan dapat dilihat seberapa besarnya ketimpangan yang terjadi di masing-masing kawasan di Kabupaten Sleman. Ketimpangan setiap kawasan di Kabupaten Sleman diperlihatkan dalam grafik 4.7 berikut.



Sumber : Diskominfo Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Grafik 4.7

Proyeksi Rerata Indeks Williamson Setiap Kawasan Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Berdasarkan grafik 4.7 dapat dilihat bahwa ketimpangan terbesar terjadi di wilayah tengah Kabupaten Sleman yang merupakan kawasan APY. Jika berpijak dari kedua grafik sebelumnya, maka penyebab ketimpangan yang cukup tinggi di wilayah tengah tersebut dikarenakan tingginya PDRB dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (di samping jumlah penduduk). Ketimpangan tertinggi kedua juga diperkirakan terjadi di wilayah utara Kabupaten Sleman. Meskipun memiliki PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah jika dibandingkan dengan kawasan lainnya, namun massifnya kegiatan perekonomian terutama sektor pariwisata yang menjamur di kawasan ini akan diperkirakan menyebabkan tingginya ketimpangan. Sama seperti wilayah utara, ketimpangan di wilayah timur juga diperkirakan karena tingginya aktifitas pariwisata dan perdagangan antar wilayah di kawasan ini. Ketimpangan terendah berada di wilayah barat yang merupakan kawasan pertanian agraris. Hal ini menjadi sangat wajar mengingat profil pekerjaan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani yang menyebabkan sebaran pendapatan dapat merata sehingga potensi ketimpangan di kawasan ini diperkirakan rendah.

4.7 Proyeksi Analisis Sektoral Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Analisis sektoral Kabupaten Sleman yang akan dianalisis meliputi analisis *Static Location Quotient* (SLQ), analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan analisis *shift share* (SS). Analisis SLQ digunakan untuk melihat apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis hanya pada saat tahun berjalan. Sedangkan analisis DLQ digunakan untuk memperkirakan apakah suatu sektor memiliki potensi atau tidak untuk dikembangkan menjadi sektor basis di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian, analisis SS digunakan untuk memberikan gambaran tentang target dari masing-masing industri/sektor dan dampaknya terhadap perekonomian. Di samping itu analisis SS memungkinkan pelaku analisis untuk dapat mengidentifikasi keunggulan daerahnya dan menganalisis masing-masing industri/sektor yang menjadi dasar perekonomian daerah. Selanjutnya, penjelasan mengenai proyeksi analisis SLQ dan DLQ Kabupaten Sleman untuk rentang waktu 2019-2026 diperlihatkan dalam tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Proyeksi Analisis SLQ dan DLQ Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

Sektor PDRB	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Rerata	
	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.7515	0.8424	0.7431	0.94849	0.7314	1.0115	0.7166	1.0456	0.6986	1.0594	0.6778	1.0582	0.6541	1.0454	0.6277	1.0228	0.7001	1.0042
B.Pertambangan dan Penggalian	0.6784	0.6736	0.6653	0.7236	0.6508	0.7578	0.635	0.7811	0.6181	0.7968	0.6002	0.8069	0.5813	0.8126	0.5615	0.8149	0.6238	0.7709
C.Industri Pengolahan	1.0012	1.1291	1.0054	1.13334	1.0084	1.1341	1.0103	1.1327	1.0112	1.1301	1.0113	1.1267	1.0106	1.1229	1.0091	1.1188	1.0084	1.1285
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0.7925	0.8754	0.7864	0.88185	0.7811	0.8879	0.7765	0.8936	0.7724	0.8988	0.7688	0.9037	0.7656	0.9082	0.7628	0.9124	0.7758	0.8952
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.4655	1.1266	0.4659	1.15427	0.4653	1.1696	0.4637	1.1769	0.4612	1.1791	0.4579	1.1777	0.4538	1.174	0.449	1.1686	0.4603	1.1658
F.Konstruksi	1.1759	1.1113	1.1865	1.09045	1.1976	1.075	1.2092	1.0631	1.2212	1.0539	1.2336	1.0465	1.2463	1.0405	1.2593	1.0356	1.2162	1.0646
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.9038	0.9629	0.9022	0.96269	0.9011	0.9631	0.9003	0.9638	0.8998	0.9648	0.8996	0.9659	0.8996	0.967	0.8999	0.9682	0.9008	0.9648
H.Transportasi dan Pergudangan	1.2261	1.2204	1.2407	1.20012	1.2547	1.1836	1.2683	1.1697	1.2814	1.158	1.2942	1.1478	1.3067	1.1388	1.3189	1.1309	1.2739	1.1687
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.0297	0.9559	1.0277	0.95433	1.0265	0.954	1.0259	0.9543	1.0259	0.9551	1.0263	0.9561	1.0271	0.9573	1.0282	0.9586	1.0272	0.9557
J.Informasi dan Komunikasi	0.9600	0.8919	0.9543	0.89237	0.9501	0.8943	0.9472	0.8969	0.9454	0.9	0.9445	0.9033	0.9443	0.9066	0.9449	0.91	0.9488	0.8994
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	0.8144	0.8388	0.8060	0.84664	0.7988	0.8542	0.7926	0.8613	0.7873	0.868	0.7827	0.8742	0.7787	0.8801	0.7752	0.8855	0.7920	0.8636
L.Real Estate	1.1295	0.9422	1.1257	0.94578	1.1222	0.949	1.1191	0.9518	1.1162	0.9544	1.1135	0.9568	1.1111	0.9589	1.1089	0.9609	1.1183	0.9525
M,N.Jasa Perusahaan	1.6311	0.9109	1.6222	0.91717	1.614	0.9226	1.6065	0.9273	1.5994	0.9315	1.5928	0.9352	1.5866	0.9386	1.5807	0.9416	1.6042	0.9281
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.7937	0.9125	0.7891	0.92354	0.7844	0.9319	0.7796	0.9384	0.7747	0.9436	0.7698	0.9479	0.7648	0.9514	0.7598	0.9543	0.7770	0.9379
P.Jasa Pendidikan	1.1523	0.9623	1.1501	0.96303	1.1483	0.9641	1.1468	0.9653	1.1457	0.9666	1.1448	0.9679	1.1442	0.9691	1.1438	0.9703	1.1470	0.9661

Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0.9180 0.8943 0.9124 0.89756 0.9078 0.9013 0.9041 0.9051 0.901 0.909 0.8986 0.9128 0.8968 0.9164 0.8954 0.9199 0.9043 0.9070

R,S,T,U.Jasa lainnya

0.8455 0.9875 0.8453 0.98559 0.8454 0.9845 0.8457 0.984 0.8462 0.9838 0.8468 0.9839 0.8476 0.9841 0.8486 0.9844 0.8464 0.9847

Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2019, data diolah

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa untuk analisis SLQ, sektor yang memiliki nilai SLQ lebih dari 1 adalah sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyedia makanan dan minuman; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; serta sektor jasa pendidikan. Sektor dengan nilai $SLQ > 1$ memberikan informasi bahwa secara rata-rata diperkirakan di tahun analisis (tahun 2019-2026) sektor-sektor tersebut dapat menjadi sektor basis (unggulan). Kemudian untuk analisis DLQ, sektor yang memiliki nilai $DLQ > 1$ adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan gas dan listrik; sektor konstruksi; sektor pengadaan air, pengolahan sampah limbah, dan daur ulang; serta sektor transportasi dan pergudangan. Sektor dengan nilai $DLQ > 1$ memberikan informasi bahwa secara rata-rata diperkirakan sektor-sektor tersebut di tahun-tahun yang akan datang mampu untuk menjadi sektor basis (unggulan) di Kabupaten Sleman.

Kemudian, setelah melihat nilai SLQ dan DLQ dari masing-masing sektor maka analisis yang selanjutnya digunakan untuk memproyeksikan keunggulan dari masing-masing sektor yang menjadi dasar perekonomian kedepannya, maka digunakanlah analisis Shift Share (SS). Proyeksi mengenai analisis SS Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 2019-2026 diperlihatkan dalam tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Proyeksi Analisis Shift Share Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

No	Sektor PDRB	Komponen Pertumbuhan Provinsi	Komponen Bauran Industri	Komponen Keunggulan Kompetitif	Total
		Nij	Mij	Cij	Dij
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	76014491.93	-55528196.7	5902579761	5923066057
B	Pertambangan dan Penggalian	4686736.839	-1468647.3	564188347.3	567406436.8
C	Industri Pengolahan	159938554.2	-43746216.1	33264882279	33381074617
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1629182.548	305819.2288	400605044.1	402540045.9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	559271.5745	-264239.279	90903916.75	91198949.04
F	Konstruksi	153564156.3	19725889.18	45170409311	45343699357
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	96975381.97	9500488.718	24373785086	24480260957
H	Transportasi dan Pergudangan	83908646.92	-9982294.8	21926357125	22000283477
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	126493491.7	19015543.01	32863187586	33008696621
J	Informasi dan Komunikasi	138083908.4	44102631.43	37891857706	38074044245
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	37645308.88	10324370.19	9457173329	9505143008
L	Real Estate	104204835.4	6853954.034	25014283457	25125342246
M,N	Jasa Perusahaan	24402455.82	2084275.364	5762903218	5789389949
O	Adm. Pemerintah, Pertahanan&Jaminan Sosial Wajib	74516913.5	-1655581.61	16128989862	16201851194
P	Jasa Pendidikan	128959681.1	9848187.004	31845569300	31984377168
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31284560.77	6830514.751	8024959103	8063074178
R,S,T,U	Jasa lainnya	29945987.05	2075622.25	7535196271	7567217881

Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2018, data diolah

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa proyeksi mengenai hasil analisis SS selama tahun 2019 hingga 2026, nilai PDRB sektoral Kabupaten Sleman telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar 99.824.750.626ribu rupiah Perkembangan nilai PDRB sektoral tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan provinsi (Nij), komponen bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan provinsi (Nij), keseluruhan sektor memiliki nilai Nij hal ini menyebabkan perkembangan total nilai PDRB Kabupaten Sleman yang cukup signifikan. Komponen bauran industri (Mij) menyatakan besarnya perubahan perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa sektor memiliki nilai bauran industri yang cukup besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bauran industri mengarahkan perekonomian Kabupaten Sleman ke arah yang lebih cepat. Selanjutnya, keseluruhan sektor pada keunggulan kompetitif (Cij) memiliki nilai positif, hal ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sleman.

4.8 Proyeksi Analisis Input-Output Kabupaten Sleman 2018-2023

Analisis Input-Output (I-O) merupakan suatu analisis yang mengelompokkan sektor ekonomi secara rinci dan terstruktur keterkaitan antar sektor secara eksplisit yang dijabarkan dalam suatu matriks yang dikenal sebagai tabel input output. Dalam siklus ekonomi tertutup, secara sederhana analisis I-O menggambarkan transaksi ekonomi yang mengalir dari golongan masyarakat yang memproduksi barang dan jasa yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat lain sebagai konsumen. Dengan kata lain akibat transaksi dalam suatu bentuk perekonomian terciptalah hubungan timbal balik antar masing-masing sektor.

Dalam memproyeksikan keterkaitan antar sektor secara eksplisit menggunakan analisis I-O, maka hal utama yang akan diperhatikan adalah tingkat keterkaitan antar masing-masing sektor. Keterkaitan tersebut dilihat dari dua sisi, yaitu tingkat keterkaitan ke depan (*forward linkage*) atau yang biasa disebut daya penyebaran

dan tingkat keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) atau yang biasa disebut derajat kepekaan. Selanjutnya, berdasarkan analisis I-O Kabupaten Sleman yang telah dilakukan tahun 2017, maka Indeks Daya Penyebaran (IDP) sepuluh sektor tertinggi di Kabupaten Sleman tahun 2017 diperlihatkan dalam tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11

Sepuluh Sektor yang Memiliki Indeks Daya Penyebaran (IDP) Tertinggi

No. Urut	Kode Sektor	Deskripsi	Nilai	Indeks
1	46	Perdagangan Besar dan Eceran Selain Mobil/Motor	2,5869	2,1033
2	1	P a d i	2,2138	1,7999
3	48	Angkutan darat, Laut, Sungai, danau dan Penyeberangan	1,8534	1,5070
4	52	Informasi dan Komunikasi	1,8174	1,4777
5	57	Real Estate	1,7897	1,4551
6	42	Listrik	1,7251	1,4026
7	51	Penyediaan Makan dan Minum	1,6684	1,3565
8	5	Kedelai	1,6560	1,3465
9	28	Industri Makanan dan Minuman Lainnya	1,5848	1,2885
10	66	Jasa Lainnya	1,5188	1,2349

Sumber: Tabel Input Output Kabupaten Sleman (diolah)

Sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau daya dorong yang cukup kuat dibandingkan sektor lainnya. Berdasarkan tabel 4.11 setiap sektor yang dianalisis menggunakan tabel I-O diberi kode sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Dapat dilihat bahwa sektor yang mempunyai daya penyebaran (IDP) tertinggi di Kabupaten Sleman yaitu sektor perdagangan besar dan eceran selain mobil/motor (46) yaitu sebesar 2,1033. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan 1 unit output sektor tersebut (sektor 46) akan menyebabkan naiknya output sektor-sektor lain (termasuk sektornya sendiri) secara keseluruhan sebesar

2,1033 unit. Peringkat kedua yaitu sektor padi (1) dengan daya penyebaran sebesar 1,7999.

Selanjutnya keterkaitan antar-sektor juga dapat dilihat dari besarnya output yang dihasilkan oleh suatu sektor sebagai akibat dari peningkatan permintaan akhir seluruh sektor ekonomi atau yang sering disebut dengan *backward linkage*. *Backward linkage* atau derajat kepekaan suatu sektor merupakan ukuran total dampak terhadap output suatu sektor akibat penggunaan output sektor tersebut oleh sektor lainnya sebagai input. Sepuluh sektor yang memiliki derajat kepekaan tertinggi disajikan dalam tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12

Sepuluh Sektor yang Memiliki Indeks Daya Kepekaan (IDK) Tertinggi

No Urut	Kode Sektor	Deskripsi	Nilai	Indeks
1	59	Jasa Periklanan	1,9413	1,5784
2	22	Industri Beras	1,7883	1,4540
3	27	Industri Pengolahan kedelai	1,7521	1,4246
4	54	Asuransi dan Dana Pensiun	1,7157	1,3950
5	33	Industri Pakaian Jadi	1,6863	1,3711
6	61	Jasa Perusahaan Lainnya	1,6429	1,3358
7	56	Jasa Penunjang Keuangan	1,5654	1,2728
8	41	Jasa Reparasi Mesin	1,5477	1,2584
9	55	Jasa Keuangan Lainnya	1,5458	1,2568
10	66	Jasa Lainnya	1,4715	1,1964

Sumber: Tabel Input Output Kabupaten Sleman (diolah)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa sektor jasa periklanan (59) memiliki derajat kepekaan tertinggi yaitu sebesar 1,5784, berarti setiap kenaikan output sebesar 1 unit akan meningkatkan permintaan sektor jasa periklanan (59) sebesar 1,5784 unit. Secara umum, sektor-sektor yang memiliki derajat kepekaan tertinggi adalah sektor-sektor yang tergolong dalam kelompok sektor jasa-jasa. Hal tersebut dapat

diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada pertumbuhan kelompok sektor jasa-jasa.

Selanjutnya, setelah melihat nilai IDP dan IDK tertinggi dari masing-masing sepuluh sektor utama, maka analisis selanjutnya untuk dapat memproyeksikan kondisi perekonomian Kabupaten Sleman ke depan adalah dengan mengkompilasikan (*overlay*) nilai IDP dan IDK dari masing-masing sektor yang telah dianalisis menggunakan tabel I-O 2017. Kompilasi dari nilai IDP dan IDK ini selanjutnya digambarkan dalam empat kuadran dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kuadran I adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP dan IDK relatif tinggi (di atas rata-rata), sektor yang masuk dalam kelompok ini merupakan sektor kunci (*key sectors*).
- b. Kuadran II adalah sektor-sektor yang mempunyai IDK tinggi (di atas rata-rata), tetapi IDP-nya rendah (di bawah rata-rata).
- c. Kuadran III adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP rendah dan IDK-nya juga rendah (di bawah rata-rata), dan
- d. Kuadran IV adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP tinggi (di atas rata-rata), tetapi IDK-nya rendah (di bawah rata-rata).

Kemudian, hasil daripada *overlay* masing-masing sektor sesuai dengan tabel I-O diperlihatkan dalam tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13

Kelompok Sektor-Sektor Ekonomi Menurut Derajat Kepekaan dan Daya Penyebaran Tabel Input Output Kabupaten Sleman

		Indeks Daya Penyebaran (IDP)	
		Tinggi	Rendah
Indeks Derajat Kepekaan (IDK)	Tinggi	<p align="center"><u>Unggulan (7 Sektor)</u></p> 1. Padi 5. Kedelai 22. Industri Beras 28. Industri Makanan dan Minuman Lainnya 30. Industri Tekstil Selain Tenun dan Batik 55. Jasa Keuangan Lainnya 57. Real Estate 58. Jasa Hukum, Akuntan, Konsultan, Arsitek, Penelitian 63. Jasa Pendidikan 66. Jasa Lainnya	<p align="center"><u>Potensial</u></p> 2. Jagung 3. Ketela Pohon 17. Jasa Pertanian dan Perburuan 23. Industri Susu dan Makanan dari Susu 42. Listrik 45. Konstruksi Khusus 46. Perdagangan Besar dan Eceran Selain Mobil/Motor 47. Perdagangan Mobil, Motor dan Reparasi Mobil/Motor 48. Angkutan darat, Laut, Sungai, danau dan Penyeberangan 51. Penyediaan Makan dan Minum 52. Informasi dan Komunikasi
	Rendah	<p align="center"><u>Potensial</u></p> 14. Susu Segar 21. Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan 25. Industri Mie, Makaroni dan Sejenisnya 26. Industri Kopi Giling dan Teh 27. Industri Pengolahan Kedele 33. Industri Pakaian Jadi 37. Industri Kertas dan Barang Dari Kertas, Percetakan dan Media Rekam	<p align="center"><u>Tertinggal</u></p> 4. Kacang Tanah 6. Sayur-Sayuran 7. Buah-Buahan 8. Tanaman Pangan dan Hortikultura 9. Tebu 10. Kelapa 11. Tembakau
		41. Jasa Reparasi Mesin 43. Pengadaan Air 49. Pergudangan, Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir 54. Asuransi dan Dana Pensiun 56. Jasa Penunjang Keuangan 59. Jasa Periklanan	12. Tanaman Perkebunan Lainnya 13. Ternak sapi dan hasilnya kecuali susu segar 15. Unggas dan Hasil-Hasilnya 16. Hasil Pemeliharaan Hewan Lainnya 18. Ikan Darat dan Hasil Perikanan darat 19. Pertambangan, Garam Kasar dan

		60. Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur	20. Penggalian Lainnya
		61. Jasa Perusahaan Lainnya	20. Industri Daging, Jeroan dan Sejenisnya
			24. Industri Roti, Biskuit dan sejenisnya
			29. Industri Pengolahan tembakau
			31. Industri Tenun
			32. Industri Batik
			34. Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki
			35. Industri Kayu Gergajian dan Awetan
			36. Industri Perabot Rumah Tangga dan Lainnya dari Kayu/Bambu Selain Furnitur
			38. Industri Barang Galian Bukan Logam dan Lainnya
			39. Industri Barang Dari Semen
			40. Industri Furniture
			44. Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil
			50. Penyediaan Akomodasi
			53. Bank
			62. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
			64. Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial
			65. Kebudayaan, hiburan dan Rekreasi

Sumber: Tabel Input Output Kabupaten Sleman (diolah)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa sektor-sektor yang dianalisis terbagi menjadi kategori sektor unggulan (7 sektor), sektor potensial, dan sektor tertinggal. Hal selanjutnya yang perlu dikaji untuk melihat sejauh mana proyeksi sektor-sektor tersebut ke depannya adalah dengan melihat kembali analisis SLQ dan DLQ yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan analisis SLQ secara rerata dari tahun 2019 hingga 2026, sektor dengan nilai SLQ >1 adalah sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estates, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Kemudian jika melihat kembali hasil kompilasi dari nilai IDP dan IDK maka terdapat 7 sektor unggulan yaitu sektor padi, kedelai,

industri beras, industri makanan dan minuman, industri tekstil selain tenun dan batik, jasa keuangan lainnya, dan real estates.

Selanjutnya jika dilihat lebih rinci, sektor padi dan kedelai yang termasuk dalam klasifikasi tanaman pangan pada analisis SLQ hanya memiliki nilai SLQ sebesar 0,801 yang artinya meskipun memiliki nilai IDP dan IDK (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tinggi terhadap sektor tersebut dan sektor-sektor lainnya, namun belum mampu mencukupi kebutuhan daerah sendiri, karena sektor tersebut (tanaman pangan) harus melakukan impor sebesar 0,382 (38,2%) agar kebutuhan daerah dapat tercukupi. Hal serupa juga terjadi pada sektor industri makanan dan minuman industri keuangan lainnya jasa hukum, akuntan, konsultan, arsitek, penelitian (termasuk dalam jasa lainnya). Meskipun memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi (unggulan) namun dari sisi basis ternyata belum mampu untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri.

Namun hal yang berbeda justru terjadi pada industri tekstil, real estates, dan jasa pendidikan. Ketiga sektor tersebut tergolong sebagai sektor unggulan dari sisi tingginya nilai IDP dan IDK dan memiliki nilai $SLQ > 1$ (sektor basis). Sektor industri tekstil memiliki nilai SLQ 1,699 dan tergolong unggulan (nilai IDP dan IDK yang tinggi) serta real estates dengan nilai SLQ 1,138 yang juga termasuk unggulan, demikian halnya dengan sektor jasa pendidikan dengan nilai SLQ 1,136 serta termasuk unggulan. Informasi mengenai sektor unggulan (nilai IDP dan IDK yang tinggi) serta tergolong sektor basis memberikan gambaran bahwa selain memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang terhadap sektor tersebut dan juga sektor-sektor lainnya, ternyata sektor tersebut juga telah mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri serta telah melakukan ekspor ke luar wilayah.

Selanjutnya, di samping analisis SLQ, membandingkan hasil DLQ dengan sektor yang unggul dari sisi nilai IDP dan IDK yang tinggi juga perlu untuk dilakukan. Nilai DLQ memberikan informasi bahwa apakah suatu sektor pada tahun-tahun yang akan datang tergolong sektor basis ($DLQ > 1$) atau non-basis ($DLQ < 1$). Sedangkan membandingkan nilai DLQ dengan sektor unggulan dari sisi nilai IDP dan IDK yang tinggi akan memberikan informasi apakah tingginya

nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang sektor tersebut juga diimbangi dengan kemampuan sektor tersebut menjadi sektor basis.

Berdasarkan tabel 4.10 sebelumnya yang kemudian dibandingkan dengan nilai IDP dan IDK maka diperoleh informasi bahwa sektor padi dan kedelai (tanaman pangan) dan sektor industri makanan dan minuman meskipun memiliki nilai IDP dan IDK tinggi namun pada tahun-tahun selanjutnya juga belum mampu menjadi sektor basis (dilihat dari nilai $DLQ < 1$). Selanjutnya sektor yang semula memiliki nilai $SLQ > 1$ ternyata pada tahun-tahun mendatang tidak tergolong dalam sektor basis. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan dari sektor tersebut rendah serta lebih rendah dari rata-rata total PDRB Kabupaten. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap ketergantungan daerah atas sektor tersebut yang tinggi meskipun memiliki tingkat keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi sehingga memicu terjadinya impor untuk mencukupi kebutuhan daerah.

Sektor real estates tetap mampu menjadi sektor basis di Kabupaten Sleman dengan nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi. Hal tersebut adalah sangat wajar sebab Kabupaten Sleman merupakan wilayah penyangga Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY di samping beberapa wilayah di Kabupaten Sleman (Mlati, Depok, Ngemplak, Ngaglik, dan Sleman) merupakan bagian dari Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) sehingga kepemilikan akan hunian menjadi begitu tinggi dalam tahun-tahun mendatang.

4.9 Analisis SWOT

Analisis ini merupakan metode perencanaan strategi dan proses identifikasi secara sistemik untuk dapat mencapai target yang telah di proyeksikan dalam analisis variabel makroekonomi dan sektoral ekonomi Kabupaten Sleman. Selain itu analisis ini digunakan untuk menentukan alternatif strategi pengembangan serta perbaikan yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Kondisi internal merupakan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kelemahan dari proses untuk mencapai target yang diharapkan, sementara kondisi eksternal merupakan faktor-faktor diluar obyek yang menjadi peluang dan ancaman terhadap obyek yang dianalisis yaitu upaya akselerasi pembangunan

ekonomi berdasarkan hasil proyeksi variabel makroekonomi dan sektoral ekonomi di Kabupaten Sleman. Kekuatan (*strength*) adalah kemampuan yang dimiliki dalam proses kegiatan sebagai upaya akselerasi yang memberikan keunggulan komparatif sebagai faktor pendorong pemerataan antar wilayah. Kelemahan (*weakness*) adalah keterbatasan kemampuan internal yang merintangi upaya pencapaian target proyeksi variabel makroekonomi dan sektoral ekonomi Kabupaten sleman.

Tabel 4.14. Analisis SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan Subur ▪ Letak strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pengangguran tinggi ▪ Investasi belum merata ▪ Infrastruktur belum optimal ▪ Daya saing UMKM rendah
Peluang (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya ODTW di Kabupaten Sleman ▪ Pendidikan maju 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan revitalisasi Sektor Pertanian ▪ Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Daya Saing Koperasi, UMKM Berbasis Kelompok dan Kluster ▪ Meningkatkan KS dengan PT dalam rangka peningkatan kualitas TK ▪ Optimalisasi dan revitalisasi infrastruktur yang ideal ▪ Pemerataan investasi
Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepariwisata daerah lain di luar Kabupaten Sleman yang mempunyai karakteristik, kelengkapan, dan keunikan yang berbeda-beda ▪ Kondisi Perekonomian ▪ Gangguan keamanan dan bencana alam ▪ Pertumbuhan penduduk tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi pariwisata ▪ Peningkatan keamanan dan pengendalian lingkungan ▪ Kebijakan pengendalian jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberdayakan Kelompok Masyarakat; ▪ Mengembangkan Jejaring antar daerah, pemerintah Provinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi

Sumber : Hasil Analisis

Peluang (*opportunities*) merupakan kondisi eksternal saat ini ataupun dimasa yang akan datang yang menguntungkan bagiterwujudnya target proyeksi variabel

makroekonomi dan sektoral ekonomi Kabupaten Sleman. Sedangkan ancaman adalah kondisi eksternal baik saat ini maupun yang akan datang yang tidak menguntungkan dan merupakan ancaman (*threaned*) bagi upaya terwujudnya target proyeksi variabel makroekonomi dan sektoral ekonomi Kabupaten Sleman. Selanjutnya, analisis SWOT ditunjukkan oleh tabel 4.14:

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan pada hasil analisis data primer dan data sekunder, analisis situasi baik internal maupun eksternal (SWOT) terhadap proyeksi variabel makroekonomi dan sektoral ekonomi di Kabupaten Sleman, maka pada bagian ini akan disampaikan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target sesuai dengan hasil proyeksi variabel makroekonomi dan sektoral ekonomi untuk tahun 2019-2026 di Kabupaten Sleman. Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan, disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Sektoral
Pencapaian Target Proyeksi Variabel Makroekonomi dan Sektoral Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2019-2026

NO	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA
PERTANIAN				
1	Optimalisasi Implementasi LP2B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan LP2B 2. Pengendalian Penataan ruang 3. Penyusunan kebijakan insentif disinsentif 4. Implementasi <i>Agricultural Land Banking</i> 	Kabupaten Sleman	DP3 PU, DPTR, BPMP2T, Bappeda DP3, DPTR, DPKA, Bappeda, Bag Perekonomian, Bappeda, DP3, DPKA
2	Peningkatan produktifitas lahan dan produksi pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi komoditas bernilai tinggi 2. Revitalisasi Irigasi 3. Intensifikasi pertanian 4. Peningkatan peran PPL 5. Pelatihan dan pendampingan petani 6. Pelatihan pertanian organik 7. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 	17 Kecamatan	DP3 PU, DP3 DP3 DP3 DP3

				DP3 DP3
3	Pengembangan Saprodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan benih, bibit unggul 2. Penyediaan pupuk dan pestisida 3. Pengembangan Alsintan (Alat mesin pertanian) 	17 kecamatan	DP3 DP3, Disperindag DP3
4	Penanganan Panen dan Pasca Panen – setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan cadangan pangan masyarakat 2. Pengembangan jaringan pemasaran 3. Standarisasi dan sertifikasi produk pertanian 4. Diversifikasi pengolahan produk pertanian 	17 kecamatan	DP3 Bagian Perekonomian, DP3, Disperindag, Kop UMKM Bag Perekonomian, DP3, Perindag, KopUKM, Kesehatan, Balai POM, MUI DP3, Disperindag, KopUKM
PARIWISATA				
1	Penguatan citra dan Promosi Kabupaten Sleman – setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi citra destinasi wisata melalui media online, media cetak, media elektronik, media ruang luar, dan pameran. 2. Penyusunan Agenda Promosi Daerah dan Kalender <i>Event</i> 3. Peningkatan peran BPPS [Dispar] 	Kabupaten	Dispar

				Bag Perekonomian, Bag Humas, Dispar, Disbud Dispar
2	Penataan kapasitas dan kualitas prasarana wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana prasarana pariwisata 2. Peningkatan prasarana lingkungan destinasi wisata 3. Penyusunan regulasi standar akomodasi 	17 kecamatan	DPU, Kominfo, Dispar, Disbud DPU, Kominfo, Dispar, Disbud Dispar
3	Penguatan peran pelaku pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan manajemen dan pelayanan wisata 2. Pemberdayaan masyarakat melalui usaha pariwisata 3. Pengembangan aksi sadar wisata dan sapta pesona di obyek wisata 4. Peningkatan kapasitas pelaku wisata 	17 kecamatan	Dispar Dispar, Disperindag, KopUKM Dispar Dispar, LSN
4	Peningkatan kapasitas Pengelolaan Desa Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pendampingan Desa Wisata 	17 kecamatan	Dispar
5	Peningkatan Konektifitas dan Keterpaduan Akses dan Moda ke lokasi daya tarik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Jalan 2. Penyediaan area parkir 3. Penataan rute/jalur wisata dan angkutan umum Pengembangan fasilitas dan moda angkutan destinasi wisata 	Kabupaten	DPU DPU

	wisata			Kominfo
KEPENDUDUKAN				
1	Pengendalian Kuantitas Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi KB dan Generasi terencana (Genre) 2. Peningkatan akses pelayanan KB 3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program KB 	Kabupaten	KBPMPP, Bappeda, Dukcapil
2	Peningkatan Kualitas Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin 2. Pemberdayaan wanita (IRT) dan Lansia 	17 Kecamatan	KBPMPP, Bappeda, Dukcapil
3	Pembangunan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontinuitas pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga 	Kabupaten	KBPMPP, Bappeda, Dukcapil
4	Pengarahannya Mobilitas Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan mobilitas penduduk non permanen 2. Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah 3. Pedoman dan aturan pengelolaan urbanisasi perkotaan 4. Perda Kebijakan mobilitas penduduk 	Kabupaten	KBPMPP, Bappeda, Dukcapil
5	Pembangunan Database kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 2. Kemudahan pelayanan e-KTP secara regular 	Kabupaten	KBPMPP, Dukcapil KBPMPP, Dukcapil

		3. Peningkatan kapasitas SDM kependudukan 4. Peningkatan kapasitas infrastruktur kependudukan		Dukcapil Dukcapil, Kominfo
KETENAGAKERJAAN				
3	Revitalisasi BLK	1. Peningkatan sarana prasarana 2. Pengembangan program pelatihan	Kabupaten Sleman	Disnaker Disnaker
4	Peningkatan kualitas dan produktifitas TK	1. Pelatihan dan pembekalan calon TK sesuai kebutuhan pasar 2. Pelatihan kewirausahaan	17 Kecamatan	Disnaker Disnaker
5	Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persebaran informasi lowongan kerja 2. Pembinaan kewirausahaan bagi generasi muda 3. Peningkatan kemitraan BLK dengan perusahaan 4. Peningkatan kemitraan SMK dengan perusahaan	Kabupaten	Disnaker, Bappeda Disnaker Disnaker Disnaker
PERINDAGKOP				
1	Revitalisasi Pasar Tradisional	1. Peningkatan sarpras pasar 2. Penataan pedagang Pelatihan pedagang dan SDM pasar tradisional – setiap tahun	17 Kecamatan	Disperindag, Dinlopas, PU Dilopas, Disperindag

2	Penataan Toko Modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Perda Toko Modern 2. Peningkatan kemitraan antara toko modern dengan UMKM 	Kabupaten	<p>Disperindag, Kop UMKM, Bagian Hukum</p> <p>Disperindag, Kop UMKM, Bagian Hukum</p>
3	Penguatan Kapasitas Usaha UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis dan pendampingan UMKM 2. Pelatihan manajemen minimarket 3. Peningkatan promosi produk UMKM 4. Peningkatan kelembagaan UMKM berbasis koperasi 	17 Kecamatan	Disperindag, Kop UMKM
4	Penguatan Manajemen Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajerial koperasi 2. Pelatihan akuntansi koperasi 	17 Kecamatan	Disperindag, Kop UMKM
KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN				
1	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan puskesmas 2. Peningkatan penanganan gizi buruk, penyandang cacat, dan lansia 	17 Kecamatan	<p>Dinkes</p> <p>Dinkes, Kependudukan</p>
PENDIDIKAN				
2	Optimalisasi Pelayanan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan pendidikan 2. Penguatan pendidikan karakter 3. Penuntasan angka buta huruf masyarakat 4. Peningkatan sarana prasarana pendidikan formal, informal dan nonformal 	Kabupaten	<p>DikBud</p> <p>DikBud, DikPora</p> <p>Dikbud</p> <p>Dikbud</p>

LEMBAGA KEUANGAN				
3	Optimalisasi Peranan Lembaga Keuangan	1. Pemetaan lembaga keuangan	Kabupaten	Bagian Perekonomian

Sumber : Hasil Analisis

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Hasil proyeksi PDRB menunjukkan terjadi kenaikan PDRB sejak tahun 2019 hingga tahun 2026. Tercatat PDRB hasil proyeksi tahun 2019 adalah sebesar 35.094.417,99 juta rupiah naik menjadi 67.867.328,22 juta rupiah dengan rerata sebesar 48.417.907,37 juta rupiah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan mengalami kenaikan dari 5,90% di tahun 2019 menjadi 12,90% di tahun 2026 dengan rerata sebesar 9,40%.
2. Penduduk usia kerja laki-laki terus mengalami kenaikan dari 485,18 ribu jiwa di tahun 2019 menjadi 551,48 ribu jiwa di tahun 2026. Penduduk usia kerja perempuan juga mengalami kenaikan dari 478,55 ribu jiwa di tahun 2019 menjadi 521,36 ribu jiwa di tahun 2026. Jumlah penduduk bekerja juga diproyeksikan naik dari 658,19 ribu jiwa di tahun 2019 menjadi 745,96 ribu jiwa di tahun 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan turun dari 4,25% di tahun 2019 menjadi 3,30% di tahun 2026.
3. Nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diproyeksikan mengalami penurunan dari 5,71 di tahun 2019 menjadi 2,06 di tahun 2026 dengan rerata sebesar 3,59.
4. Nilai inflasi diproyeksikan mengalami kenaikan dari 1,29% di tahun 2019 menjadi 1,62% di tahun 2026 dengan rerata sebesar 1,45%.
5. Jumlah penduduk miskin diproyeksikan akan mengalami penurunan dari 89.798 jiwa di tahun 2019 menjadi 69.170 jiwa di tahun 2026, yang juga memberikan kesimpulan bahwa presentasi penduduk miskin juga akan turun dari 7,31% di tahun 2019 menjadi 3,76% di tahun 2019. Garis kemiskinan diproyeksikan naik dari Rp 382.717 kap/bulan di tahun 2012 menjadi Rp 524.350 kap/bulan.

6. Ketimpangan di Kabupaten Sleman diproyeksikan mengalami kenaikan dari 0,4963 di tahun 2019 menjadi 0,4970 di tahun 2026 dengan rerata sebesar 0,4967.
7. Berdasarkan analisis SLQ sektor yang memiliki nilai SLQ >1 adalah sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyedia makanan dan minuman; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; serta sektor jasa pendidikan. Berdasarkan analisis DLQ, sektor yang memiliki nilai DLQ >1 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan gas dan listrik; sektor konstruksi; sektor pengadaan air, pengolahan sampah limbah, dan daur ulang; serta sektor transportasi dan pergudangan. Berdasarkan analisis SS, nilai PDRB sektoral Kabupaten Sleman telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar 99.824.750.626ribu rupiah. Berdasarkan analisis I-O, sektor dengan daya penyebaran tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran selain mobil dan motor, serta sektor dengan daya kepekaan tinggi adalah sektor jasa periklanan.

6.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan, berikut disampaikan rekomendasi kebijakan dalam rangka pencapaian target proyeksi variabel makroekonomi dan sektoral ekonomi Kabupaten Sleman selama periode tahun 2019-2026 adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan kependudukan harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Program kependudukan yang sudah dituangkan dalam *Grand Design* Kependudukan yang meliputi kebijakan pengendalian penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembinaan keluarga, pengarahannya mobilitas penduduk, dan pembangunan *database* harus segera diimplementasikan selama 5 tahun kedepan. Permasalahan kependudukan berkaitan erat dengan masalah pengangguran, dalam kajian ini angka pengangguran juga merupakan variabel yang memberikan pengaruh positif signifikan terhadap besarnya ketimpangan di Kabupaten Sleman sehingga

kebijakan terhadap kedua permasalahan tersebut dapat direncanakan dan dikoordinasikan dengan strategi yang integral.

2. Kebijakan yang berkaitan dengan produktifitas lahan sangat diperlukan dalam pencapaian target di sektor. Selain itu diperlukan rencana aksi implementasi LP2B yang meliputi pemetaan LP2B, kebijakan pengendalian tata ruang, penyusunan kebijakan insentif disinsentif serta *agricultural land banking*.
3. Kebijakan pengembangan sektor pariwisata agar tercipta *value added* berupa *income* yang lebih tinggi di Kabupaten Sleman. Pengembangan sektor pariwisata yang harus dilakukan adalah pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat (termasuk lansia) dan berbasis potensi ekonomi lokal.
4. Koperasi merupakan sarana pengurangan ketimpangan yang efektif. Peningkatan peran koperasi dapat dilaksanakan secara inheren dengan pengembangan UMKM. Dengan membentuk koperasi, pengembangan UMKM memiliki kesempatan untuk *sharing* (berbagi), bertukar pengalaman, saling memberikan saran, dorongan (motivasi) atau penguatan terhadap satu sama lain. UMKM yang sudah lebih maju dapat menularkan kemampuannya kepada yang lemah. UMKM lemah dapat bermitra dengan yang lebih kuat membentuk jaringan dalam meningkatkan kapasitas produksinya. Jaringan ini bisa membentuk sentra-sentra produksi baru. Jaringan bisnis yang berbentuk koperasi ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan sekedar paguyuban. Prinsip dasar kerja koperasi yang menjadi jiwa dan spirit dalam operasional kerjanya sangat menitikberatkan kepada pengembangan usaha, kerjasama produktif, pendidikan dan *training* anggota yang *sustainable* dengan pengelolaan usaha yang demokratis. Koperasi yang kuat dapat memberikan wadah kepada para pelaku UMKM untuk dapat mengakses permodalan secara lebih mudah dan murah, melakukan kerjasama dan *deal* bisnis dengan pihak luar secara lebih elegan dan meyakinkan, terutama bagi para pengusaha mikro yang tidak memiliki badan hukum usaha, dan persyaratan legal lainnya. Koperasi dapat membantu mengadvokasi mereka dalam melakukan kerjasama. Selain itu koperasi juga dapat dikembangkan dalam rangka

meningkatkan daya saing ditengah menjamurnya toko modern di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman dapat mencoba membuat gebrakan baru dengan meluncurkan UKM *Mart*. UKM *Mart* adalah toko ritel modern berbasis koperasi. UKM *Mart* ini dijadikan semacam perangsang bagi gerakan koperasi untuk lebih mampu menata kemampuan manajemennya. Pengembangan UKM *Mart* ini dapat di mulai dengan Waserda yang sudah ada di Koperasi, kemudian difasilitasi dengan dana bantuan agar menjadi minimarket modern berskala UKM. Keberadaan UKM *Mart* berpotensi membangun jaringan bisnis antar gerai UKM *Mart* dan UKM dengan pemasok. Peningkatan kapasitas usaha Waserda menjadi UKM *Mart* dengan tagline Koperasi, merupakan respon sekaligus sebagai upaya sistematis, untuk menghadapi dan menanggapi fenomena permasalahan toko modern di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin.2010. *Pembangunan Ekonomi*. STIM YKPN. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik.2016.*Konsep Produk Domestik Bruto*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Boediono. 1988. *Ekonomi Makro : Seri Sinopsis , Pengantar Ilmu Ekonomi No 2*.BPFE. Yogyakarta
- Hardjan, Rusli.2008. *Hukum Ketenagakerjaan*.Ghalia Indonesia. Jakarta
- Kuncoro, Mudrojad.2004. *Pembangunan Ekonomi*.Erlangga. Jakarta
- Mankiw, Gregory.2009. *Makro Ekonomi*.Erlangga. Jakarta
- Mulyadi, S.2014. *Ekonomi Sumberdaya Manusia Dalam Prespektif Pembangunan*.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Murti, Sumarni dan John Suprihanto.2014.*Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Liberty. Yogyakarta
- Nopirin.2000. *Ekonomi Moneter Buku 2*.BPFE. Yogyakarta
- Sendjun, H Manulang.2010. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Bhineka Cipta. Jakarta
- Sukirno, Sadono.2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Suryawati. 2005. *Teori Ekonomi Mikro*.UPP.AMP YKPN. Yogyakarta
- Susilawati,dkk.2016.*Penentuan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Tarigan,Robinshon.2005.*Ekonomi Regional*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Smith Stephen C.2006.*Ekonomi Pembangunan Dunia Ketiga*, Edisi 9. Erlangga, Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB Hasil Proyeksi Sebagai Dasar Analisis Variabel Makroekonomi dan Sektoral Ekonomi

Sektor PDRB	Proyeksi PDRB (juta Rp)								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rerata
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,095,895.62	2,135,821.79	2,191,590.53	2,263,627.35	2,352,533.27	2,459,030.16	2,583,883.92	2,727,791.68	2,351,271.79
B.Pertambangan dan Penggalian	129,224.19	133,378.64	138,777.33	145,532.99	153,791.28	163,734.75	175,587.87	189,622.93	153,706.25
C.Industri Pengolahan	4,409,876.41	4,670,087.42	4,991,472.30	5,383,929.18	5,860,027.38	6,435,656.30	7,130,874.77	7,971,022.40	5,856,618.27
D.Pengadaan Listrik dan Gas	44,920.34	48,092.96	51,971.21	56,682.57	62,388.57	69,293.65	77,656.77	87,806.80	62,351.61
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,420.41	16,115.48	16,990.50	18,069.14	19,381.54	20,965.75	22,869.43	25,152.06	19,370.54
F.Konstruksi	4,234,119.49	4,595,801.99	5,033,891.32	5,563,605.50	6,204,188.37	6,980,017.51	7,922,061.33	9,069,802.39	6,200,435.99
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,673,835.91	2,867,147.90	3,103,166.46	3,389,708.89	3,736,676.38	4,156,601.53	4,665,367.20	5,283,152.43	3,734,457.09
H.Transportasi dan Pergudangan	2,313,555.75	2,487,893.39	2,700,300.73	2,957,903.13	3,269,721.47	3,647,176.51	4,104,751.50	4,660,864.79	3,267,770.91
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,487,718.57	3,748,919.62	4,067,256.07	4,453,386.95	4,920,807.72	5,486,603.58	6,172,439.13	7,005,861.45	4,917,874.14
J.Informasi dan Komunikasi	3,807,293.20	4,109,481.05	4,476,733.95	4,921,558.92	5,459,782.07	6,111,444.91	6,901,982.49	7,863,776.43	5,456,506.63
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	1,037,968.36	1,112,972.17	1,204,548.29	1,315,729.37	1,450,356.52	1,613,291.64	1,810,696.31	2,050,398.67	1,449,495.17
L.Real Estate	2,873,168.68	3,070,946.74	3,313,043.78	3,607,351.73	3,963,871.86	4,395,259.97	4,917,541.78	5,551,053.26	3,961,529.73
M,N.Jasa Perusahaan	672,832.23	718,345.40	774,110.36	841,934.26	924,107.70	1,023,528.98	1,143,867.00	1,289,775.33	923,562.66
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,054,603.91	2,181,168.76	2,337,077.26	2,527,213.35	2,757,775.18	3,036,600.46	3,373,592.80	3,781,280.32	2,756,164.01
P.Jasa Pendidikan	3,555,717.12	3,807,993.02	4,116,303.46	4,490,799.10	4,944,339.16	5,493,198.73	6,157,997.24	6,964,919.67	4,941,408.44
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	862,587.81	926,319.37	1,004,044.44	1,098,354.81	1,212,532.44	1,350,732.00	1,518,220.62	1,721,693.53	1,211,810.63
R,S,T,U.Jasa lainnya	825,680.23	885,447.42	958,413.86	1,046,997.21	1,154,259.62	1,284,077.06	1,441,361.74	1,632,354.78	1,153,573.99
Produk Domestik Regional Bruto	35,094,417.99	37,515,932.83	40,479,691.52	44,082,384.07	48,446,540.09	53,727,212.96	60,120,751.31	67,876,328.22	48,417,907.37

Lampiran 2. PDRB Per Kecamatan Hasil Proyeksi

Kecamatan	Rerata PDRB (000 Rp)	Rerata LPE (%)	Rerata IW
Moyudan	879,031.99	3.01	0.0502
Minggir	873,260.28	3.82	0.0400
Seyegan	1,581,660.51	4.05	0.0253
Godean	2,522,846.13	5.07	0.0244
Gamping	3,057,095.08	5.31	0.1041
Mlati	3,088,243.61	5.04	0.1186
Depok	6,470,794.49	6.10	0.0246
Berbah	1,417,430.89	4.57	0.1140
Prambanan	1,259,509.38	4.62	0.0725
Kalasan	2,560,143.00	4.64	0.0872
Ngemplak	1,675,580.03	3.30	0.1087
Ngaglik	3,181,604.49	5.11	0.1425
Sleman	4,026,125.62	5.08	0.1703
Tempel	1,214,880.21	3.42	0.0902
Turi	542,000.96	3.45	0.1205
Pakem	1,061,391.60	3.68	0.0658
Cangkringan	548,636.42	4.05	0.0966
Kab. Sleman	48,417,907.37	9.40	0.4967

Lampiran 3. Pembagian Survei Untuk Mendapatkan Data Primer

1. Klasifikasi Sasaran Survei

No	Klasifikasi Responden	Jumlah
1	Tanaman Pangan	20
2	Tanaman Hortikultura	10
3	Perikanan	4
4	Market/Toko/Swalayan	2
Jumlah		36

2. Pembagian Responden Untuk Tanaman Pangan

No	Wilayah	Kecamatan	Desa	Jumlah Responden (kelompok tani)	Nama Surveyor
1	Utara	Cangkringan	Wukirsari	3	Isnaeni Suryaningsih, S.E
		Pakem	Harjobinangun	2	
		Total Responden		5	
2	Tengah	Sleman	Pandowoharjo	3	
		Ngaglik	Sardonoharjo	2	
		Total Responden		5	
3	Timur	Kalasan	Selomartani	3	Prabowo Adi Mahardika, S.E
		Prambanan	Madurejo	2	
		Total Responden		5	
4	Barat	Sayegan	Margodadi	3	
		Minggir	Sendangmulyo	2	
		Total Responden		5	
Total Responden Untuk Tanaman Pertanian				20	

3. Pembagian Survei Untuk Perikanan

No	Wilayah	Kecamatan	Produktifitas (data 2016)	Jumlah Responden (perikanan)	Nama Surveyor
1	Utara	Tempel	1.467,68 kw/Ha	1	Isnaeni Suryaningsih, S.E
2	Tengah	Mlati	2.381,58 Kw/Ha	1	
3	Timur	Berbah	780,00 Kw/Ha	1	Prabowo Adi Mahardika, S.E
4	Barat	Minggir	1.187,88 Kw/Ha	1	
Total Responden Untuk Perikanan				4	

4. Pembagian Survei Untuk Tanaman Hortikultura

No	Kecamatan	Jumlah Responden (Hortikultura)	Nama Surveyor
1	Sleman	2	Isnaeni Suryaningsih, S.E
2	Turi	2	
3	Tempel	2	
4	Pakem	2	Prabowo Adi Mahardika, S.E
5	Cangkringan	2	
Total Responden Hortikultura			10

5. Pembagian Survei Untuk Pasar Swalayan

No	Jenis Swalayan	Kecamatan	Jumlah Responden	Nama Surveyor
1	Superindo	Mlati	1 (pengelola/manajer)	Prabowo Adi Mahardika, S.E
2	Superindo / Indogrosir	Mlati	1 (pengelola/manajer)	
Total Responden Swalayan				2